

PENGARUH KEBIJAKSANAAN DEREGULASI 27 OKTOBER 1988
TERHADAP PERKEMBANGAN KOMODITI EKSPOR NON MIGAS
SULAWESI SELATAN.



O L E H

R I S M A N

NOMOR STAMBUK/NIRM : 4586010359/871133881

JURUSAN STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG

1 9 9 1

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

: PENGARUH KEBIJAKSANAAN DEREGULASI 27
OKTOBER 1988 TERHADAP PERKEMBANGAN
KOMODITI EKSPOR NON MIGAS SULAWESI
SELATAN.

NAMA MAHASISWA

: RISMAN

NOMOR STAMBUK/NIRM

: 4586010359/871133881

ALAMAT

: JL. GAGAK No.1, UJUNG PANDANG

JURUSAN

: STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS

: EKONOMI

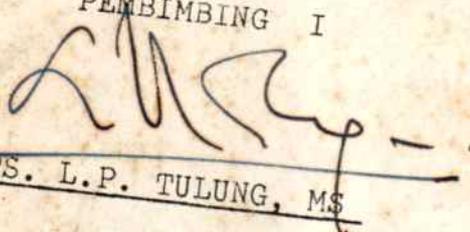
P T S

: UNIVERSITAS "45"

PROGRAM STUDI

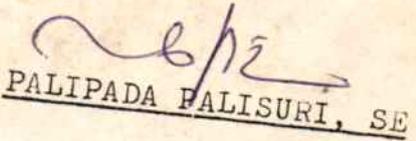
: ILMU-ILMU EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
MENYETUJUI :

PEMBIMBING I



DRS. L.P. TULUNG, MS

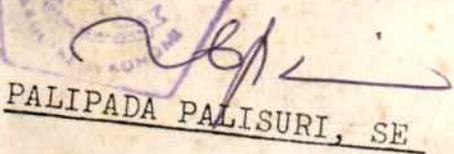
PEMBIMBING II



PALIPADA PALISURI, SE

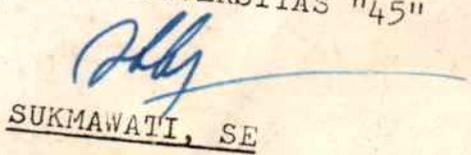
MENGETAHUI :


DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45"



PALIPADA PALISURI, SE

KETUA JURUSAN STUDI
PEMBANGUNAN FAKULTAS
EKONOMI UNIVERSITAS "45"
ub



SUKMAWATI, SE

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN/PENGUJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK/GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Masalah Pokok	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan	4
1.4. Hipotesis	5
1.5. Tata Urut Bahasan	5
BAB II. KERANGKA TEORI	
2.1. Pengertian dan Makna Deregulasi	7
2.2. Tujuan Pakto 27	8
2.3. Reformasi Sistem dan Kebijakan Eks- por	16
2.4. Pengertian Perdagangan Internasional ..	26
2.5. Ekspor Bagi Negara-Negara yang Sedang Berkembang	33
2.6. Perkembangan Ekspor dan Pola Perdagang- an	36

BAB	III. M E T O D O L O G I	
	3.1. Kerangka Konseptual	43
	3.2. Metode Penelitian	44
	3.3. Jenis dan Sumber Data	45
	3.4. Metode Analisis	45
BAB	IV. DISKRIPSI KEADAAN PERKEMBANGAN EKSPOR NON MIGAS SULAWESI SELATAN.	
	4.1. Perkembangan Volume Ekspor Non Migas Su- lawesi Selatan	46
	4.2. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Su- lawesi Selatan	53
	4.3. Kontribusi Ekspor Ketujuh Jenis Komoditi Non Migas Terhadap Jumlah Ekspor Sulawe- si Selatan	59
BAB	V. ANALISIS PENGARUH KEBIJAKSANAAN PAKTO 27 TERHADAP KETUJUH EKSPOR NON MIGAS SULAWESI SELATAN.	
	5.1. Perkembangan Ketujuh Jenis Komoditi Eks- por Non Migas Sebelum Pakto 27	64
	5.2. Perkembangan Ketujuh Jenis Komoditi Eks- por Non Migas Sesudah Pakto 27	70
BAB	VI. PENUTUP	
	6.1. Simpulan	75
	6.2. Saran - Saran	76
	DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

	Hal
1. Indikator Hutang Luar Negeri Indonesia	10
2. Negara Perdagangan Indonesia Secara Keseluruhannya dan dengan Negara-Negara Tertentu	37
3. Perkembangan Volume Ketujuh Komoditi Ekspor Non Migas Sulawesi Selatan 1984 - 1989	47
4. Perkembangan Nilai Ketujuh Komoditi Ekspor Non Migas Sulawesi Selatan 1984 - 1989	54
5. Perkembangan Nilai Ekspor Sulawesi Selatan 1984 - 1989	60
6. Kontribusi Ketujuh Ekspor Non Migas Terhadap Jumlah Ekspor Sulawesi Selatan 1984 - 1989	62
7. Perkembangan Ketujuh Jenis Komoditi Ekspor Non Migas Sulawesi Selatan Sebelum Pakto 27	65
8. Volume dan Nilai Ketujuh Jenis Komoditi Ekspor Non Migas Sulawesi Selatan Sesudah Pakto 27	71

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Adalah suatu tugas yang tidak mudah untuk menilai dampak keseluruhan berbagai paket kebijaksanaan yang baru berumur beberapa tahun. Apalagi paket tersebut masih berubah-ubah secara tidak konsisten. Untuk menilai dampak suatu paket kebijaksanaan, diperlukan informasi mengenai sasaran yang ingin dicapainya, peralatan kebijaksanaan yang tersedia untuk mencapai sasaran itu, bagaimana mencapainya, dan kenyataan empiris mengenai hasil pelaksanaannya. Informasi mengenai kenyataan empiris akan hasil pelaksanaan Pakto 27 masih memerlukan waktu yang relatif lama. Apalagi tulisan ini dihubungkan dengan masalah ekspor beberapa jenis komoditi non-migas. Kenyataan empiris tersebut antara lain dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat mengimplementasikan paket peraturan baru itu. Nikmatnya kue baru dapat diketahui setelah dirasakan oleh lidah dan tidak cukup hanya sekedar memandang kecantikan warna maupun rupanya saja, mencium aromanya, ataupun menyentuh kelembutannya. Selanjutnya jangkauan Paket 27 adalah jauh lebih luas daripada jangkauan kebijaksanaan deregulasi perbankan 1 Juni 1983 terhadap perkembangan ekspor non-migas.

Ekspor sebagai komponen perdagangan internasional,

yang merupakan salah satu sumber dana berupa devisa dan pajak yang sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi negara sedang berkembang.

Dewasa ini perdagangan luar negeri dapat dipakai sebagai motor penggerak pembangunan yang handal, karena perdagangan luar negeri akan sangat menentukan perkembangan ekonomi suatu negara. Demikian pula negara-negara yang tidak berhasil meningkatkan eksportnya akan mengalami kesulitan untuk mencapai atau mempertahankan laju pertumbuhan ekonominya pada tingkat memadai. Karena itu banyak negara sedang berkembang semakin menyadari bahwa untuk menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi, perlu dipelihara keterbukaan pasaran luar negeri, dan menjalin hubungan kerja sama ekonomi yang baik dengan negara-negara lain.

Sebagai negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, seperti Indonesia, tentunya tidak terlepas dari pengaruh perekonomian dunia, yang dewasa ini masih belum menggembirakan. Terlebih lagi dengan merosotnya harga minyak bumi dan turunnya harga beberapa komoditi lainnya di pasar internasional pada tahun 1986, yang mana mengakibatkan kelesuan ekonomi di dalam negeri.

Dengan terjadinya hal-hal tersebut di atas maka pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan deregulasi yang disebut sebagai Paket Deregulasi 27 Oktober 1988. Salah satu tujuan dari paket deregulasi 27 Oktober

1988 atau disingkat 27 adalah mengharapkan agar lembaga keuangan dapat semakin aktif dalam membelanjai proses restrukturalisasi ekonomi nasional, khususnya dalam membelanjai kegiatan yang menyangkut ekspor non-migas.

Dengan adanya kebijaksanaan dari pemerintah tentang deregulasi tersebut (Pakto 27), maka memberikan angin segar bagi para eksportir untuk memperbesar usahanya dengan menambah modal melalui bank dan lembaga-lembaga keuangan non-bank (LLKNB).

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, maka penulis sangat menaruh perhatian untuk memilih judul "Pengaruh Kebijaksanaan Deregulasi 27 Oktober 1988 terhadap Perkembangan Komoditi Ekspor Non Migas Sulawesi Selatan".

Jika kita melihat ekspor non-migas Sulawesi Selatan pada tahun 1987 (sebelum Pakto 27) yang nilainya sebesar US\$.278.361.754,- dengan volume sebesar 360.221 ton, maka pada tahun 1989 (sesudah Pakto 27) nilai eksportnya meningkat menjadi sebesar US\$.545.781.362,- dengan jumlah volume sebesar 362.690 ton. (Kanwil Dep. Perdagangan Sulawesi Selatan).

Dari kaitan tersebut di atas, Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 memberikan pengaruh terhadap ekspor non-migas Sulawesi Selatan.

Adapun ekspor non-migas Sulawesi Selatan, yang akan penulis teliti di antaranya kopi, udang, gaplek, te-

ripang, rumput laut, dan biji coklat serta telur ikan terbang.

1.2. Masalah Pokok

Bertitik tolak dari latar belakang yang dikemukakan di atas; dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah keberadaan kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988 berpengaruh terhadap peningkatan komoditi ekspor non-migas Sulawesi Selatan.
2. Dapatkah kebijaksanaan 27 Oktober 1988 tersebut memberikan pengaruh kenaikan atas setiap jenis komoditi ekspor utama Sulawesi Selatan.

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penulisan/pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk meneliti sejauh mana pengaruh kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988 dapat merangsang volume dan nilai komoditi ekspor non-migas Sulawesi Selatan.
2. Memberikan gambaran tentang perkembangan volume dan nilai komoditi ekspor non-migas yang utama di Sulawesi Selatan sebelum dan sesudah deregulasi 27 Oktober 1988.

Sedangkan kegunaan penulisan atau pembahasan skripsi ini adalah :

3. Untuk menambah pengalaman penulis dalam lapangan penelitian dan untuk memenuhi salah satu syarat guna

menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Studi Pembangunan Universitas "45" Ujung Pandang.

1.4. Hipotesis

Bertitik tolak dari masalah pokok dan tujuan yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut :

1. Diduga bahwa, dengan adanya kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988, maka berpengaruh terhadap peningkatan komoditi ekspor non-migas Sulawesi Selatan.
2. Diduga bahwa, dengan kebijaksanaan deregulasi tersebut akan memberikan pengaruh terhadap kenaikan atas setiap jenis komoditi ekspor non-migas utama Sulawesi Selatan.

1.5. Tata Urut Bahasan

Penulisan ini disusun atas bab-bab sebagai berikut :

- Bab I, pendahuluan yang berisikan latar belakang, masalah pokok, tujuan dan kegunaan, hipotesis dan tata urut bahasan.
- Bab II, kerangka teori yang membahas mengenai pengertian dan makna deregulasi, tujuan Pakto 27, reformasi sistem dan kebijaksanaan ekspor, pengertian perdagangan internasional, ekspor bagi negara-negara yang sedang berkembang, dan perkembangan ekspor dan pola perdagangan.

- Bab III, metodologi yang terdiri dari kerangka konseptual, metode penelitian, jenis dan sumber data, serta metoda analisis.
- Bab IV, diskripsi keadaan perkembangan ekspor non-migas Sulawesi Selatan yang membahas tentang perkembangan volume ekspor non-migas Sulawesi Selatan, perkembangan nilai ekspor non-migas Sulawesi Selatan, dan kontribusi ekspor ketujuh jenis komoditi non-migas terhadap jumlah ekspor Sulawesi Selatan.
- Bab V, analisis pengaruh kebijaksanaan Pakto 27 terhadap ketujuh ekspor non-migas Sulawesi Selatan yang terdiri dari perkembangan ketujuh jenis komoditi ekspor non-migas sebelum Pakto 27 dan setelah Pakto 27.
- Bab VI, adalah penutup yang mencakup simpulan dan saran-saran.

B A B II
KERANGKA TEORI

2.1. Pengertian dan Makna Deregulasi .

Makna deregulasi sering disamakan dengan privatisasi atau swastanisasi. Savas (1987 : 34), misalnya mengartikan :

"Privatisasi sebagai tindakan kebijaksanaan yang mengurangi peranan pemerintah, atau meningkatkan peranan swasta, baik dalam kegiatan perekonomian maupun dalam pemilikan aktiva atau kekayaan ekonomi".

Sebaliknya, Waterson (1988 : 47), membedakan pengertian yang menyangkut tindakan kebijaksanaan untuk mengurangi campur tangan pemerintah dalam mempengaruhi kegiatan dunia usaha dalam tiga kelompok yakni :

"Privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi".

Swastanisasi atau privatisasi adalah penjalan ataupun pemindahan hak milik badan usaha negara pada pihak swasta.

Menurut pengertian Anwar Nasution (1990 : 1) dalam bukunya "Tinjauan Ekonomi Atas Dampak Paket Deregulasi Tahun 1988", mengemukakan bahwa :

"Deregulasi merupakan pengurangan aturan maupun kendala yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan dunia usaha".

Sesuai dengan yang dikemukakan Waterson yang mengartikan liberalisasi sebagai pengendoran atas berbagai pembatasan yang mengatur pendirian usaha baru untuk masuk pada suatu cabang kegiatan ekonomi (Market Entry).

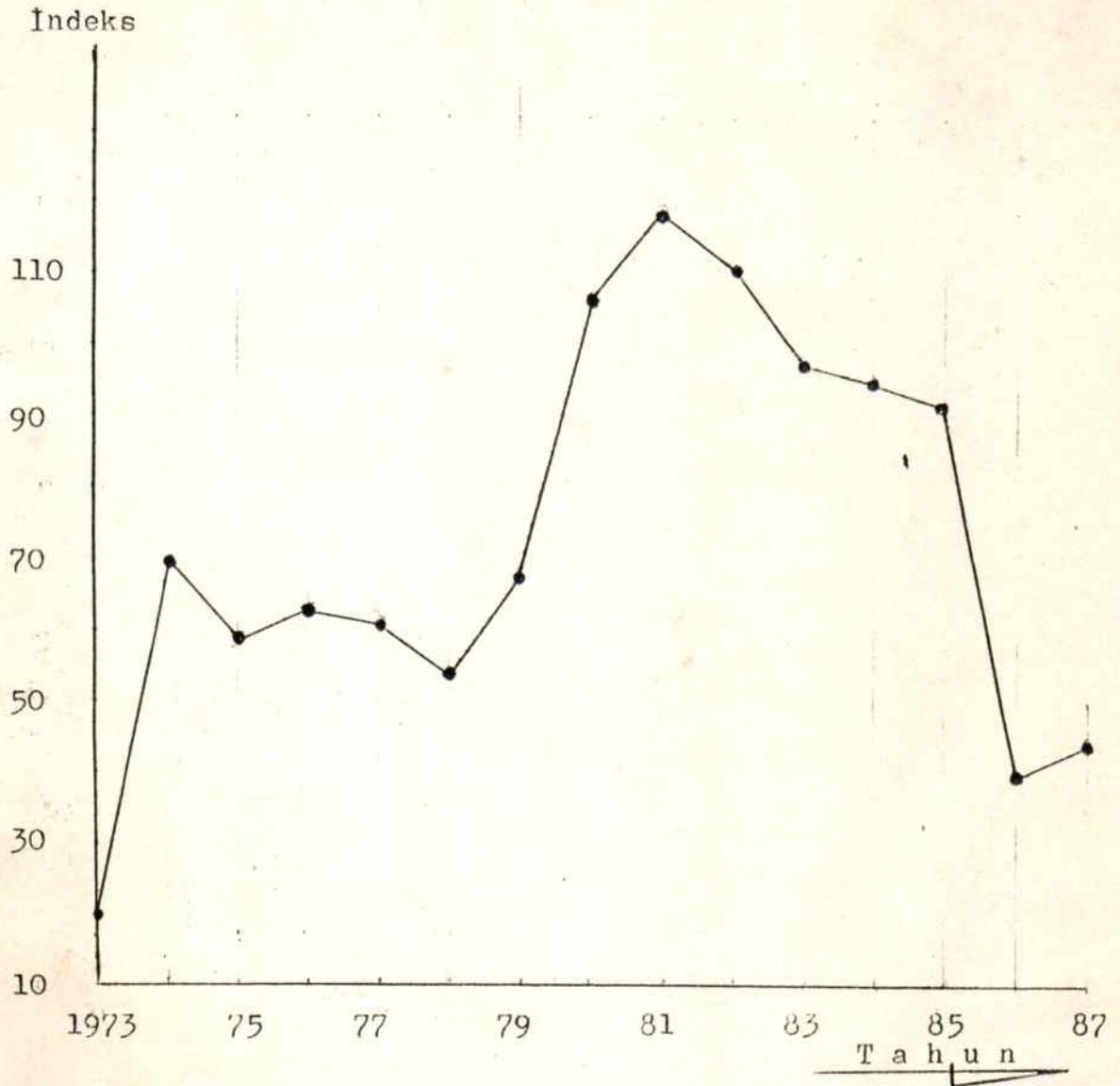
Pengertian deregulasi dalam Bahasa Indonesia; nampaknya mencampuradukkan ketiga pengertian di atas. Dengan menggunakan pengertian Waterson, deregulasi di sektor keuangan tanggal 27 Oktober 1988 (disingkat Pakto 27) dan 20 Desember 1988 (Pakdes 20) menyangkut sekaligus deregulasi dan liberalisasi. Hingga sekarang ini belum ada tanda-tanda bahwa pemerintah akan menjual saham bank-bank milik negara (Pemerintah Pusat maupun Daerah) pada masyarakat.

Bercampur-aduknya pengertian dalam Bahasa Indonesia akan istilah deregulasi, antara lain karena kita sangat alergi terhadap perkataan liberalisasi. Sebagai warisan dari era Orde Lama di masa lalu, liberalisasi kita artikan dalam konotasi negatif. Mengikuti konsep komunis, liberalisasi kita artikan sebagai persaingan bebas tanpa aturan dimana akan terjadi eksploitasi oleh golongan yang kuat pada golongan yang lemah ataupun kebebasan tanpa aturan yang menjurus pada anarki sehingga dapat mengganggu stabilitas nasional.

2.2. Tujuan Pakto 27

Sebagaimana telah dijelaskan oleh pemerintah, Pakto 27 adalah bagian dari kebijaksanaannya untuk meningkatkan mobilisasi tabungan nasional, meningkatkan efisiensi lembaga keuangan, dan merasionalisir alokasi sumber ekonomi. Upaya untuk meningkatkan mobilisasi tabungan nasional itu sangat penting terutama setelah pe-

GRAFIK 2.1.
PERKEMBANGAN HARGA RIIL MINYAK BUMI



TABEL 2.1.
INDIKATOR HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA

Tahun	Persen Hutang LN thd GNP	Rasio Hutang LN thd Ekspor	Rasio Debt Service thd Hutang LN	Rasio Debt Service thd Ekspor	Rasio Pembayaran Hutang Pemerintah thd Ag Ttl
1980	27,9	94,1	13,4	12,6	6,4
1981	25,4	91,3	14,2	12,9	6,6
1982	29,4	124,6	13,2	16,5	8,4
1983	39,0	151,7	12,1	18,4	11,3
1984	39,8	146,2	13,0	19,0	14,1
1985	43,9	177,7	14,1	25,1	14,5
1986	58,5	278,1	12,5	34,9	23,1

Sumber : Bank Indonesia, Laporan Tahunan 1986/1987.

nurunan tingkat harga minyak bumi dan meningkatnya beban pembayaran hutang luar negeri dewasa ini. Dengan perkembangan lain, deregulasi di Indonesia adalah terutama karena alasan pragmatis.

Sejak Pelita I, keperluan investasi bagi pembangunan nasional terutama bersumber dari Pajak Perseroan Minyak dan bantuan serta pinjaman luar negeri. Kedua sumber penerimaan itu masuk ke dalam perekonomian nasional melalui anggaran negara. Bantuan dan pinjaman luar negeri digunakan untuk menyeimbangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain menyeimbangkan anggaran negara, kedua sumber juga sekaligus berperan dalam menutup defisit Neraca Pembayaran Luar Negeri kita.

Dalam menghadapi penurunan nilai riil tingkat harga minyak bumi yang terlihat pada grafik 2.1. dan peningkatan beban hutang luar negeri yang terlihat pada tabel 2.1. sejak tahun 1983. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah-langkah kebijaksanaan yang tepat. Berbagai langkah atau tindakan kebijaksanaan pemerintah tersebut dapat digolongkan dalam tiga kelompok besar. Pertama, kebijaksanaan untuk mengencangkan ikat pinggang yakni, menurunkan pengeluaran konsumsi dan investasi masyarakat serta pengeluaran anggaran negara. Kedua meningkatkan produksi nasional melalui restrukturalisasi perekonomian untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi serta daya saing perekonomian nasional di pasar dunia.

Ketiga, meningkatkan tabungan nasional baik dalam rupiah maupun valuta asing. Secara populer, kebijaksanaan yang ketiga ini dikenal sebagai kebijaksanaan untuk meningkatkan penerimaan pajak, mobilisasi tabungan melalui lembaga keuangan dan upaya untuk meningkatkan ekspor non migas.

Tabungan nasional terdiri dari tiga komponen, yakni, tabungan pemerintah, tabungan dunia usaha, serta tabungan rumah tangga perorangan. Tabungan pemerintah merupakan selisih antara jumlah penerimaannya (di luar pinjaman dan bantuan luar negeri) dengan jumlah pengeluaran rutinnya. Sebagian dari pengeluaran pembangunan sebenarnya merupakan bagian dari pengeluaran rutin, seperti honor, uang perjalanan, dan lain-lain pengeluaran yang merupakan suplemen gaji pejabat yang terlibat di dalam proyek pembangunan itu. Tabungan dunia usaha merupakan bagian dari laba yang diinvestasikan kembali sehingga tidak dibagikan kepada pemegang saham.

Sasaran utama dari reformasi dalam sistem keuangan nasional adalah untuk meningkatkan mobilisasi tabungan rumah tangga dan tabungan dunia usaha melalui lembaga-lembaga keuangan formal. Pada umumnya, tingkat tabungan rumah tangga perorangan ditentukan oleh kemampuan dan kemauan masyarakat untuk menabung serta kesempatan yang terbuka bagi mereka untuk menempatkan tabungan tersebut pada lembaga-lembaga keuangan formal.

Kemampuan menabung ditentukan oleh tingkat pendapatan masyarakat setelah dikurangi pajak (disposable income) serta tingkat pengeluaran konsumsinya. Pada gilirannya tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat, antara lain, ditentukan oleh besar kecilnya jumlah tanggungan anggota keluarga tenaga kerja produktif yang menghasilkan pendapatan itu. Kemauan untuk menabung ditentukan oleh faktor-faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik, disamping faktor ekonomi seperti tingkat balas jasa tabungan.

Kesempatan masyarakat untuk menabung ditentukan oleh adanya lembaga keuangan yang dapat dipercaya sebagai pemegang amanah penabung dalam mengelola tabungannya, kemudahan berhubungan dengan lembaga-lembaga itu serta tersedianya jenis produk atau instrumen penempatan tabungan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Masalah amanah menyangkut kepercayaan. Kemudahan berhubungan dengan lembaga keuangan ditentukan oleh jaringan kantor lembaga-lembaga keuangan itu serta kemudahan pelayanannya.

Dalam sistem perkreditan yang didasarkan pada pagu, kredit selektif, dan subsidi bunga di masa lalu, pemerintah melakukan alokasi langsung kredit perbankan. Represi industri perbankan seperti ini telah menimbulkan distorsi alokasi sumber keuangan dan sekaligus menghambat mobilisasi tabungan dan pengembangan sistem keuangan

nasional. Alokasi langsung seperti ini sudah mulai berkurang sejak deregulasi 1 Juni 1983 dan diharapkan semakin berkurang setelah Pakto 27. Demikian pula dengan peranan langsung pemerintah dalam menentukan tingkat suku bunga tabungan masyarakat pada perbankan.

Sejak deregulasi 1 Juni 1983 itu, peranan pasar semakin menonjol dalam mobilisasi dana dan alokasi perkreditan. Dalam kaitan yang terakhir ini, melalui Pakto 27, pemerintah mengharapkan agar lembaga keuangan dapat semakin aktif dalam membiayai proses restrukturalisasi ekonomi nasional, khususnya dalam membelanjai kegiatan yang menyangkut upaya untuk meningkatkan ekspor non-migas. Disamping itu, peranan investasi sektor swasta juga diharapkan untuk menjadi semakin menonjol dalam pembe-lanjaan pembangunan nasional dalam Pelita V. Peningkatan peranan sektor swasta dalam perekonomian hanya dapat dimungkinkan jika didukung oleh adanya industri keuangan yang efisien.

Untuk mengoreksi struktur industri perbankan, yang didominir oleh lima bank-bank umum negara, Pakto 27 mengundang partisipasi swasta (termasuk swasta asing melalui bank campuran) yang lebih besar dalam industri keuangan nasional. Selain menambah jumlah bank dan meningkatkan persaingan antara sesama lembaga keuangan, peningkatan efisiensi sistem keuangan didorong oleh Pakto 27 melalui internasionalisasi pasar uang dan modal nasi-

onal. Dalam rangka internasionalisasi pasar uang dan modal nasional itu, pemerintah mengundang peningkatan peranan lembaga keuangan dan modal asing, mempermudah izin bank devisa, mempermudah penggunaan fasilitas swap valuta asing dan memperpanjang jangka waktunya, serta meniadakan pagu pinjaman luar negeri perbankan maupun LKBB. Melalui fasilitas swap valuta asing, Bank Indonesia mengambil alih risiko perubahan kurs devisa (rupiah terhadap US Dollar).

Sementara itu untuk menyegarkan kembali sasaran serta pokok-pokok kebijaksanaan yang dicakup dalam Pakto 27, dalam Lampiran IA, dimuat kembali pengumuman pemerintah tentang deregulasi di bidang keuangan, moneter, dan perbankan yang dikenal dengan Pakto 27. Lampiran IB memuat ketentuan lanjutan yang diumumkan pada tanggal 25 Maret 1989.

Peningkatan tabungan masyarakat dalam bentuk kekayaan financial, peningkatan efisiensi lembaga-lembaga keuangan serta semakin terintegrasinya industri keuangan nasional dengan industri keuangan internasional, sekaligus membuka wawasan baru dalam pengendalian moneter.

2.3. Reformasi Sistem dan Kebijaksanaan Ekspor

Kenaikan yang cukup pesat dari ekspor non-migas pada tahun-tahun belakangan ini terutama terjadi sebagai akibat dari berbagai rangkaian kebijaksanaan perdagangan dan reformasi sistem ekspor dalam rangka meningkatkan daya saing komoditi ekspor di pasar internasional dan berbagai upaya dalam mendorong ekspor non-migas tersebut.

Dalam hubungan itu pertama-tama dapat dikemukakan kebijaksanaan ekspor Januari 1982. Dalam rangka kebijaksanaan tersebut ditempuh langkah-langkah yang bersifat menyeluruh di bidang lalu lintas devisa, tata cara pembayaran dengan penyederhanaan prosedur, perkreditan dan jaminan kredit ekspor, perpajakan dan jasa-jasa angkutan laut. Data Republik Indonesia (1985 : 322).

Tindakan-tindakan terpenting meliputi kebebasan penyerahan devisa bagi eksportir, kebebasan bagi importir untuk menggunakan cara-cara pembayaran lain disamping L/C, penurunan suku bunga kredit ekspor pada umumnya menjadi 6% serta penurunan biaya pelabuhan dan pengangkutan.

Selanjutnya dapat dicatat bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor yang semakin melemah, khususnya ekspor non-migas, disamping melindungi/meningkatkan kegiatan industri barang substitusi impor, pada tanggal 30 Maret 1983 telah dilakukan devaluasi rupiah sebesar 27,8% menjadi Rp.970, per dollar AS. Data Bank

Indonesia (1982/83 : 161), dengan tetap memakai sistem nilai tukar bebas, berupa kebijaksanaan nilai tukar mengambang terkendali. Sebagai hasilnya pada tahap-tahap pertama nilai saing barang ekspor Indonesia cukup meningkat, disamping iklim usaha masih dapat dipelihara khususnya dalam rangka mendorong produksi dalam negeri. Bank Indonesia (1985/1986 : 78).

Kebijaksanaan perdagangan yang dilakukan kemudian dalam mendorong ekspor (non-migas) adalah berupa penyederhanaan ketentuan angka pengenal ekspor. Ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepastian berusaha bagi perusahaan-perusahaan perdagangan ekspor. Ketentuan angka pengenal ekspor tersebut antara lain menetapkan bahwa sejak 19 Desember 1984, angka pengenal ekspor atau angka pengenal ekspor sementara dapat digunakan untuk melaksanakan ekspor dari seluruh Wilayah Republik Indonesia yang sebelumnya hanya terbatas pada wilayah-wilayah tertentu saja.

Selanjutnya sejak awal Repelita IV telah dilakukan langkah-langkah untuk lebih menyederhanakan prosedur yang berlaku dan penghapusan izin-izin yang dapat menghambat ekspor. Dalam hubungan ini pada bulan April 1985 telah diambil kebijaksanaan penting dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No.4 tahun 1985 (dikenal dengan Inpres No.4/1985) tentang penyederhanaan arus barang di pelabuhan untuk menunjang kegiatan ekonomi khususnya se-

bagai usaha meningkatkan ekspor non-migas. Republik Indonesia (1983/1989 : 196-199). Kebijakan ini adalah merupakan awal dari kebijaksanaan deregulasi (di bidang perdagangan) yang menyangkut perombakan dan penyederhanaan tata laksana ekspor, pelayanan antar pulau, pengu-rusan barang dan dokumen, keagenan umum perusahaan pe-layanan dan tata laksana operasional.

Untuk menyelamatkan neraca pembayaran dari keada-an yang memburuk akibat kemerosotan harga minyak dan dalam rangka mendorong ekspor non-migas pada tahun-tahun berikutnya pemerintah telah mengambil rangkaian kebijak-sanaan penyelamatan, yaitu paket 6 Mei 1986, devaluasi 12 September 1986, kebijaksanaan 28 Oktober 1986 dan pa-ket kebijaksanaan 16 Januari 1987. Republik Indonesia (1987 : V.6-V.11). Dan kemudian pemerintah melanjutkan dengan kebijaksanaan 10 Juni 1987 dan kebijaksanaan pa-ket 24 Desember 1987, yang dikenal dengan kebijaksanaan Pakdes 1987.

Dalam hubungan dengan yang disebutkan di atas, pertama-tama dapat dikemukakan kebijaksanaan paket 6 Mei 1986 yang dikenal sebagai Pakem 1986. Kebijakan pemerintah ini ditujukan untuk meningkatkan penerimaan devisa negara dari ekspor non-migas dan penanaman modal asing. Khusus yang dari pananaman modal asing, Pakem an-tara lain mengatur :

1. Dengan habisnya masa berlaku sertifikat ekspor, maka

- untuk mempertahankan daya saing, sistem tersebut diganti dengan fasilitas pemngambilan biaya masuk (drawback),
2. produsen eksportir diberikan kebebasan menggunakan barang dan bahan baku/penolong dalam negeri dengan harga yang setinggi-tingginya sama dengan harga impor di pasar internasional atau mengimpor barang dan bahan baku/penolong tanpa dikenakan peraturan tata niaga,
 3. Membentuk suatu kawasan berikat di Jakarta sebagai sarana bagi pengembangan ekspor non-migas.

Kemudian dalam rangka mengamankan neraca pembayaran pada tingkat yang sehat terutama akibat perkembangan faktor ekstern yang tidak menguntungkan seperti kemerosotan yang tajam dalam harga migas, penurunan harga komoditi primer dan melemahnya daya saing barang ekspor di pasar internasional, maka pemerintah pada tanggal 12 September 1986 terpaksa melakukan kebijaksanaan devaluasi lagi. Pada waktu itu nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diturunkan sebesar 31% yaitu dari Rp.1.134,- per US \$ 1 menjadi Rp.1.644,- per US \$ 1. Kebijakan penyesuaian nilai tukar rupiah terhadap valuta asing itu telah banyak menentukan kemampuan daya saing barang ekspor non-migas di pasar dunia dan dapat menekan/mengurangi impor barang-barang. Disamping itu telah dapat meningkatkan kapasitas terpasang dari industri yang ada,

mencegah spekulasi devisa dan pelarian modal ke luar negeri, sehingga cadangan devisa dapat dipertahankan pada jumlah yang pantas.

Agar supaya kebijaksanaan devaluasi itu dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan maka pada tanggal 25 Oktober 1986 pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan lagi kebijaksanaan tindak lanjut devaluasi di bidang perdagangan, moneter dan penanaman modal. Khusus di bidang perdagangan lain dilakukan penurunan bea masuk terhadap bahan baku/penolong tertentu yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri untuk menekan biaya produksi, baik untuk tujuan ekspor maupun untuk pasar dalam negeri.

Sebagaimana kelanjutan dari kebijaksanaan tersebut di atas, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijaksanaan 15 Januari 1987 yang mencakup deregulasi empat cabang industri, yaitu industri-industri tekstil, besi baja, mesin dan mesin listrik serta kendaraan bermotor, yang dimaksudkan untuk dapat lebih memperlancar penyediaan barang-barang produksi baik untuk dalam negeri maupun untuk ekspor. Diantaranya sebanyak 103 tarif CCCN dibebaskan tataniaganya dan diganti dengan kebijaksanaan perlindungan melalui tarif (bea masuk). Disamping itu sebanyak 142 tarif pos dipindahkan dari sistem tata niaga ke sistem importir terdaftar atau importir produsen, dan kebijaksanaan ini juga meliputi pemberian keringanan tarif bea masuk, dimana sebanyak 55 pos tarif produk in-

dustri diturunkan tarif bea masuknya.

Sehubungan dengan usaha peningkatan ekspor non-migas, terutama komoditi industri, maka kemudian pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan 10 Juni 1987 yang berintikan penyederhanaan (lebih lanjut) dalam pemberian izin usaha industri. Kebijaksanaan tersebut memuat ketentuan antara lain bahwa perusahaan industri yang telah memiliki izin tetap diberikan kebebasan mengadakan perluasan dan atau diversifikasi produk yang tercakup dalam lingkungan jenis industrinya tanpa diwajibkan memiliki izin perluasan terlebih dahulu sepanjang DSPnya masih terbuka. Sedangkan untuk perusahaan industri yang hasil produksinya dimaksudkan untuk ekspor, kebebasan perluasan dan atau diversifikasi produknya berlaku juga untuk jenis industri yang tertutup dalam DSPnya. Disamping itu upaya penyederhanaan dalam pemberian izin industri, dalam rangka menunjang ekspor tekstil dan hasil-hasilnya telah disempurnakan pula ketentuan tentang tata niaga ekspor dan kuota bagi tekstil dan produk tekstil.

Sebagai kelanjutan dan merupakan bagian dari kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi dalam rangka kebijaksanaan penyesuaian dan pembangunan, maka pada tanggal 24 Desember 1987 pemerintah telah mengumumkan pula serangkaian kebijaksanaan (yang dikenal sebagai Pakdes 1987), khususnya dalam rangka mendorong ekspor non-migas dan pariwisata serta pemasukan modal dari luar

negeri. Republik Indonesia (1987 : V.6-V.11).

Dalam paket ini antara lain telah dilakukan penyederhanaan izin ekspor, yaitu dengan menghapus angka pengenal ekspor (APE), APE sementara dan APE terbatas, sehingga izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sudah cukup merupakan pengakuan sebagai eksportir. Dikecualikan dari ketentuan ini adalah ekspor beberapa jenis barang yang terkena kuota internasional seperti kopi dan tekstil. Disamping itu diberikan fasilitas yang lebih besar dalam upaya peningkatan daya saing dan peningkatan ekspor, yaitu yang menyangkut keringanan bea masuk dan pajak pertambahan nilai serta memperpendek prosedur administrasi untuk memperolehnya, disamping mempertegas lembaga yang menanganinya. Fasilitas yang diberikan di bidang pengembangan kepariwisataan dalam menunjang ekspor non-migas antara lain meliputi penyederhanaan perizinan untuk membangun hotel, restoran, wisata bahari, biro perjalanan dan obyek wisata, dari sebanyak 33 jenis izin menjadi hanya dalam bentuk izin sementara usaha pariwisata (ISUP) dan izin tetap usaha pariwisata (ITUP).

Setelah lama ditunggu-tunggu tentang kelanjutan kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi di bidang pengembangan ekspor non-migas, maka pada tanggal 27 Oktober 1988 telah dikeluarkan paket kebijaksanaan pemerintah di bidang keuangan, moneter dan perbankan yang dikenal dengan Pakto 27 (1988). Dalam hubungan ini khu-

sus mengenai peningkatan ekspor non-migas telah diambil kebijaksanaan yang bersangkutan dengan perluasan bank devisa, pendirian bank campuran, pembukaan kantor cabang pembantu bank asing, penyempurnaan mekanisme swap dan ketentuan tentang pedagang valuta asing. Republik Indonesia (1988).

Mengenai perluasan bank devisa diambil kebijaksanaan bahwa syarat untuk mendirikan bank devisa diperingan, yaitu hanya dikaitkan dengan tingkat kesehatan bank adalah sehat atau cukup sehat serta volume usahanya minimal Rp.100 milyar. Disamping itu cabang-cabang bank devisa nasional kini secara otomatis berfungsi sebagai bank devisa dan cukup melaporkan saja kepada bank Indonesia.

Selanjutnya dibuka kemungkinan mendirikan bank campuran dengan syarat-syarat :

1. Didirikan bersama oleh bank nasional dan bank asing;
2. bank nasional yang ikut serta mendirikan adalah sehat atau cukup sehat;
3. bank asing yang menjadi partner haruslah yang telah mempunyai kantor perwakilan di Indonesia, termasuk peringkat besar di negaranya, dan negara asalnya menganut azas resiprositas;
4. modal di setor minimal Rp.50 milyar di mana penyertaan bank nasional minimal 15% dan bank asing maksimal 85%
5. bank campuran dapat memilih tempat kedudukan di Ja-

karta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Ujung Pandang dan Dempasar, dan

6. setelah 12 bulan sejak didirikannya, posisi kredit ekstopor dari bank campuran tersebut harus mencapai minimal 50% dari kredit yang diberikannya.

Tentang pembukaan kantor cabang pembantu bank asing ditetapkan bahwa bank asing itu telah ada selama ini tergolong sehat termasuk permodalannya dapat membuka kantor cabang pembantu. Dan setelah 12 bulan sejak dibukanya kantor cabang pembantu posisi kredit ekspor dari cabangnya tersebut harus minimal 50% dari kredit yang diberikan.

Dengan kebijaksanaan baru ini dilakukan penyempurnaan mekanisme swap dengan menetapkan bahwa :

1. Jangka waktu swap diperpanjang dari maksimal 6 bulan menjadi maksimal 3 tahun,
2. premi swap didasarkan pada keadaan pasar, yaitu perbedaan antara rata-rata suku bunga deposito di dalam negeri dan LIBOR, dan
3. jika bank mengenakan premi lebih tinggi, maka premi swap ulang ke Bank Indonesia disesuaikan dengan premi yang bersangkutan.

Akhirnya ketentuan baru tentang pedagang valuta asing adalah bahwa :

1. Izin usaha pedagang valuta asing yang selama ini berlaku 1 tahun, diubah menjadi izin tanpa batas waktu,

- yang dapat dicabut jika terjadi penyimpangan,
2. bank-bank bukan devisa juga diperkenankan melakukan usaha-usaha pedagang valuta asing dan
 3. usaha pedagang valuta asing mencakup jual beli uang kertas/logam asing dan pembelian travellers cheque.

Kemudian tidak lama setelah itu, maka sebagai pelengkap kebijaksanaan Pakto 27 (1988) tersebut di atas, dalam rangka untuk semakin meningkatkan efisiensi perekonomian nasional, pemerintah telah memutuskan untuk mengambil serangkaian langkah-langkah kebijaksanaan sebagai berikut :

1. Penyempurnaan tata niaga impor barang,
2. deregulasi di bidang perdagangan, industri dan pertanian,
3. pemberian kemudahan pada produksi untuk ekspor, dan
4. deregulasi di bidang angkutan laut.

Rangkaian kebijaksanaan ini dikenal sebagai Pakto 21 (1988). Republik Indonesia (21 Nopember 1988).

Sungguhpun berbagai rupa kebijaksanaan tersebut tidak banyak yang langsung berkaitan dengan usaha menunjang ekspor khususnya ekspor non-migas, tetapi kebijaksanaan-kebijaksanaan itu ada kaitannya dengan produksi, distribusi dan kelancaran lalu lintas barang dalam usaha peningkatan ekspor tersebut.

2.4. Pengertian Perdagangan Internasional

Pengertian perdagangan internasional banyak dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi yang berbeda-beda dalam penyajiannya, tetapi pada prinsipnya adalah sama. Untuk jelasnya penulis mengemukakan pengertian perdagangan internasional oleh Boediono, (1981 : 8) bahwa :

"Perdagangan diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak suka rela dari masing-masing pihak".

Sedangkan menurut Nopirin, (1974 : 2) bahwa :

"Perdagangan internasional meliputi transaksi pertukaran barang/jasa antara satu negara dengan negara lain".

Jadi dapat dikatakan bahwa perdagangan internasional membahas tentang hubungan dagang antara satu negara dengan negara lain atau untuk lebih jelasnya membahas tentang ekspor dan impor dari negara-negara lain yang melakukan perdagangan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dari perdagangan tersebut.

Selain kedua pengertian perdagangan tersebut di atas Samuelson menyatakan bahwa, (1976 : 69) sebagai berikut :

"International trade is mutually profitable even when one of the countries can produce every commodity more cheaply (in terms of labour or all resources) than the other country".

Di sini Samuelson menunjukkan bahwa perdagangan internasional dapat memberikan keuntungan secara timbal balik jika suatu negara dapat memproduksi setiap ba-

rang dengan sangat murah (dalam penggunaan tenaga kerja atau semua sumber-sumber dayanya) dibandingkan dengan negara lain.

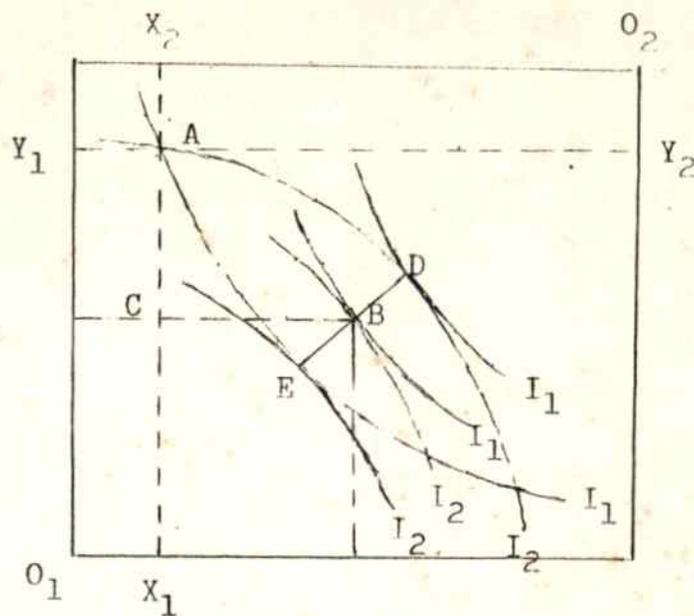
Adapun pembagian manfaat perdagangan antar pihak-pihak yang melakukan pertukaran ditentukan oleh kekuatan masing-masing dalam proses tawar menawar.

Apabila kekuatan ekonomi antara kedua belah pihak tidak seimbang misalnya negara yang satu mempunyai kekuatan monopoli sedang negara lain tidak, maka pembagian manfaat dari pertukaran cenderung untuk tidak seimbang.

Berikut ini diberikan gambaran manfaat dari perdagangan (gains from trade) dalam diagram kotak Edgeworth-Bowley atau Edgeworth-Bowley box diagram, yaitu :

Misalkan ada dua negara yang mengadakan perdagangan yaitu Indonesia dan Jepang dengan dua macam barang misalnya uang (Y) dan kain (X) dalam jumlah tertentu. Pada diagram di sebelah keadaan Indonesia digambarkan pada bagian kiri bawah dari kotak dengan titik awal O_1 , yang mana memiliki barang X sebanyak O_1X_1 dan barang Y sebanyak O_1Y_1 , sedangkan keadaan Jepang digambar pada bagian kanan atas dari diagram kotak dengan titik awal O_2 , yang mana memiliki barang X sebanyak O_2X_2 dan barang Y sebanyak O_2Y_2 .

Titik A menunjukkan posisi dari kedua negara sebelum perdagangan, bila masing-masing negara mengkonsumsi seluruh barang yang dimilikinya dengan tingkat kepuasan



Sumber : Boediono, Ekonomi Internasional, (Yogyakarta : Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada), 1981.

masing-masing I_1 untuk Indonesia dan I_2 untuk Jepang. Untuk mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi misalnya titik B, maka kedua negara tersebut perlu mengadakan perdagangan. Dalam hal ini Indonesia harus menawarkan barang Y sebanyak AC untuk ditukarkan dengan barang X sebanyak CB. Jika Jepang ingin menerima tawaran ini, tentunya ia harus mengurangi konsumsinya untuk barang X sebanyak CB dan sebagai gantinya ia memperoleh barang Y sebanyak AC. Jadi di sini dilihat bahwa dengan adanya perdagangan antara kedua negara tersebut, maka dapat menghasilkan pola konsumsi baru yang menguntungkan kedua belah pihak. Kenaikan kepuasan yang ditimbulkan oleh perdagangan inilah yang disebut dengan *gains from trade*

(manfaat dari perdagangan).

Sehubungan dengan ini Gattfried Haberler, (1959) seorang ahli ekonomi klasik yang menganut prinsip keuntungan komperatif (comparative advantage principle) dalam perdagangan bebas internasional (free international trade) telah mengemukakan manfaat tak langsung (indefi benefit) perdagangan internasional sebagai berikut :

- "a. Trade provides material means which are indispensable for economic development
- b. Trade is the means and vehicle for the dissemination of technological knowlegde, the transmission of ideas, importation of know how skills managerial talente and enter preneurships
- c. Trade is also the vehicle for the internetional movement of capital especially from the developed countries and
- d. Free international trade is the best way to quarantee the main to nance of a healthy degree of free degree of free competation".

Selanjutnya Todaro, (1985 : 226-227) mengemukakan lima kesimpulan prinsip dasar terhadap perdagangan dan pembangunan oleh klasik dan neo-klasik sebagai berikut :

- "1. Perdagangan merupakan stimulator penting bagi pertumbuhan ekonomi. Ia memperluas kapasitas konsumsi suatu negara, meningkatkan output dunia dan membuka jalan bagi sumber daya langka memasuki pasaran dunia, sebab tanpa proses yang demikian negara-negara miskin tidak akan mampu berkembang.
- 2. Perdagangan condong mendorong adanya keadilan internasional dan dalam negeri di bidang faktor returns dan menaikkan real income negara-negara yang terjun dalam perdagangan dunia dengan menggunakan secara efisien setiap du-

- kungan sumber daya dalam negeri dan luar negeri yaitu gaji yang relatif menurun di negara-negara yang tenaga kerjanya langka.
3. Perdagangan membantu negara-negara mencapai perkembangan dengan cara meningkatkan dan menghargai sektor-sektor ekonomi di mana masing-masing negara memiliki comparative advantage apakah di bidang efisiensi ketenagakerjaan maupun dukungan faktornya.
 4. Dalam perdagangan bebas dunia, harga-harga internasional dan biaya produksi menentukan berapa banyak suatu negara harus berdagang, dalam rangka kesejahteraan nasionalnya. Negara-negara harus mengikuti ketentuan-ketentuan mengenai prinsip komparative advantage dan tidak mencoba mencampuri mekanisme pasar.
 5. Akhirnya dalam usaha meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan, diperlukan suatu policy yang berpandangan internasional. Dalam semua kasus, rasa percaya kepada diri sendiri dan Autarky yang didasarkan pada sikap isolasi yang ada kaitannya dengan perasaan rendah diri di bidang ekonomi untuk berpartisipasi ke dalam perdagangan dunia yang bebas dan tidak dibatasi".

Dalam dunia modern sekarang, perdagangan internasional mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena perdagangan internasional sesuai yang dikutip/dikemukakan oleh Soelistyo, (1981 : 7) memungkinkan terjadinya :

- a. Tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa.
- b. Pergerakan sumber daya melalui batas-batas negara.
- c. Pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya".

Pada dasarnya perdagangan internasional tidak jauh berbeda dengan perdagangan antar daerah dalam suatu negara, karena masing-masing dalam pemecahannya berdasarkan pada prinsip-prinsip dan hukum-hukum ekonomi. Namun

demikian, terdapat perbedaan keduanya yaitu unsur jarak perdagangan di mana perdagangan internasional dilakukan dengan melewati batas-batas geografi suatu negara, sedangkan perdagangan antar daerah hanya berkisar dalam wilayah geografis suatu negara.

Selain itu Soelistyo mengemukakan bahwa terdapat perbedaan-perbedaan tersebut, (1981 : 7) antara lain yaitu :

- "1. Perbedaan mata uang yang digunakannya.
2. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan hubungan-hubungan ekonomi tersebut.
3. Derajat mobilitas sumber daya yang dipakai, seperti tanah, sumber daya alam yang lain, tenaga kerja dan modal.
4. Perbedaan dalam hukum, selera dan adat istiadat".

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa perdagangan internasional sangat diperlukan sebab merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemakmuran sesuatu bangsa seperti yang dikemukakan oleh Sobri, (1986 : 2) sebagai berikut :

- "1. Tidak semua negara mempunyai peralatan produksi ataupun kondisi ekonomis yang sama, kualitas maupun kuantitas.
2. Akibat dari ketidaksamaan kondisi-kondisi ekonomis maka terjadilah perbedaan biaya produksi sesuatu barang antara negara yang satu dengan negara yang lain. Dengan adanya perdagangan maka sesuatu negara dapat memperoleh sejumlah barang dengan harga yang lebih murah daripada bila barang tersebut dihasilkan sendiri di dalam negeri. Keuntungan lain yang timbul karena adanya perdagangan adalah bahwa sesuatu negara dapat menghindarkan diri dari sejenis produksi sesuatu barang yang harus biayanya relatif tinggi karena kurangnya faktor-faktor produksi

yang dibutuhkan dan tidak tersedia secara cukup, untuk dimanfaatkan dalam perdagangan. Akhirnya dengan timbulnya perdagangan maka bagi negara-negara yang bersangkutan akan saling dapat memperoleh sejumlah barang dengan total cost yang lebih rendah".

Hal inilah yang menyebabkan setiap negara mengadakan spesialisasi pada suatu produk tertentu sesuai dengan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dalam mengisi transaksi perdagangan internasional itu sendiri.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang yang relatif banyak memiliki faktor produksi tenaga kerja sedangkan di lain pihak miskin akan modal, menyebabkan Indonesia memulai mengembangkan dengan terlebih dahulu mengkhususkan diri dalam meningkatkan ekspor bahan-bahan baku dalam menunjang penerimaan devisa untuk pertumbuhan ekonominya.

Salah satu peningkatan devisa melalui ekspor adalah produksi hasil-hasil perikanan dan pertanian di mana daerah Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah pengeksport hasil-hasil perikanan dan pertanian di Indonesia. Untuk itu, pengembangan ekspor hasil perikanan ini perlu ditingkatkan dalam menunjang devisa melalui perdagangan internasional sebagai pendapatan pemerintah. Dengan adanya peningkatan ekspor hasil-hasil perikanan dan pertanian yang ditunjang oleh harga di pasaran dunia yang baik dan pantas, tentunya akan merangsang para petani di sektor ini untuk memperbesar volume produksinya dalam mengisi transaksi perdagangan internasional itu

sendiri.

Di lain pihak terjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik melalui sektor perikanan dan pertanian, karena akan memungkinkan terjadinya perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan di sektor perikanan dan pertanian ini.

2.5. Ekspor Bagi Negara-Negara Yang Sedang Berkembang

Bagi negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, maka ekspor tentulah sangat penting artinya. Seperti yang telah dikemukakan di muka bahwa mana kala suatu negara telah memusatkan perhatiannya pada pembangunan ekonomi, maka peranan sektor luar negeri dalam hal ini perdagangan internasional dalam mempengaruhi negara tersebut tentu akan meningkat. Dan biasanya peningkatan tersebut dapat dilihat atau diukur dari ratio antara perdagangan internasional itu sendiri terhadap pendapatan nasional negara tersebut.

Dapat dilihat melalui suatu kutipan yang dikemukakan oleh Todaro, (1983 : 23) bahwa :

"....., negara-negara sedang berkembang lebih banyak tergantung pada perdagangan luar negeri untuk andil/bagiannya dalam pendapatan nasional, daripada negara-negara yang sudah sangat maju".

Bagaimanapun, dalam konteks negara yang sedang membangun, jelas membutuhkan dana pembiayaan yang besar dan utamanya pembiayaan bagi barang-barang modal tidak dapat terpenuhi oleh negara-negara sedang berkembang itu

sendiri dan harus diimpor dari negara-negara yang telah maju.

Hasil penerimaan ekspor, khususnya bagi negara-negara yang sedang berkembang tak dapat disangsikan lagi peranannya yang sangat penting artinya sehubungan dengan pembangunan ekonomi mereka. Secara konkritnya bahwa hasil penerimaan ekspor tadi merupakan sumber pembiayaan bagi kemampuan negara-negara tersebut untuk mengimpor barang-barang modal, utamanya yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan pembangunan ekonominya.

Masalah perdagangan internasional ini lebih dapat diperjelas lagi jika kita kembali melihat ciri serta keadaan di negara-negara berkembang itu sendiri. Kesamaan ciri atau keadaan yang mendasar di hampir seluruh negara-negara sedang berkembang dapat disebutkan sebagai, kecilnya pendapatan nasional yang menyebabkan rendahnya pendapatan perkapita dan meluasnya kemiskinan bagi masyarakatnya. Selain itu, yang merupakan masalah kronis dan penanggulangan yang sangat sulit dirasakan bagi negara-negara sedang berkembang yaitu tingginya tingkat pengangguran yang diiringi oleh ketidakmerataan pendapatan masyarakatnya. Akhirnya, sebagai konsekuensi dari keadaan-keadaan yang demikian itu menimbulkan ketidakpercayaan diri bagi hampir seluruh negara berkembang di dunia ini. Di lain pihak, ekspor yang dikembangkan oleh rata-rata negara sedang berkembang hingga kini sifatnya

masih merupakan komoditi primer, seperti misalnya makanan ataupun bahan untuk makanan, bahan-bahan baku, mineral dan bahan bakar/minyak mentah yang kesemuanya merupakan produk-produk pokok sebagai sumber atau penghasil devisa yang sangat penting artinya bagi negara-negara tersebut.

Olehnya itu apa yang telah diungkapkan oleh para ahli ekonomi, masih banyak lagi teori-teori tentang perdagangan internasional yang memberikan manfaat serta keuntungan bagi keadaan-keadaan di negara-negara berkembang. Seperti misalnya yang ditambahkan oleh Todaro bahwa perdagangan merupakan stimulator bagi pertumbuhan ekonomi dengan memperbesar kemampuan suatu negara untuk mengkonsumsi, meningkatkan output secara global dan memberikan jalan keluar untuk mengatasi sumber-sumber yang langka. Selanjutnya yang paling penting adalah bahwa perdagangan cenderung untuk meningkatkan persamaan internasional maupun domestik melalui penyamaan harga-harga faktor, serta lebih meningkatkan penerimaan atau pendapatan riil bagi negara-negara yang terlibat dalam perdagangan tersebut.

Selain itu, perdagangan membantu suatu negara dalam usahanya untuk mencapai pembangunan ekonomi dengan melalui atau memberikan penghargaan bagi sektor-sektor ekonomi yang belum berkembang tetapi memiliki prospek dan keuntungan komparatif untuk diekspor.

2.6. Perkembangan Ekspor dan Pola Perdagangan

Jika diperhatikan perkembangan ekspor dan impor Indonesia selama periode 1981-1987 pada tabel berikut terlihat fluktuasinya, baik dari segi nilai ekspor maupun dari segi nilai impornya. Ada sedikit kesamaan fluktuasinya itu, dimana ekspor cenderung menurun dari tahun 1981 hingga tahun 1986 dan pada tahun 1987 meningkat kembali. Sedangkan impor cenderung menurun sejak tahun 1982 hingga tahun 1986 dan pada tahun 1987 meningkat kembali. Namun demikian jika dihitung secara keseluruhannya dalam periode 1981 - 1986 itu nilai ekspor cenderung menurun dengan laju pertumbuhan yang lebih buruk (-9,1%) daripada laju pertumbuhan nilai impornya (-4,2%). Sedangkan persentase kenaikan tahun 1987 terhadap tahun 1986 dalam hal nilai ekspor (15,7%) adalah hampir sama saja dengan persentase kenaikan nilai impornya (15,4%). Data BPS.

Sehubungan dengan perkembangan tersebut di atas, maka dalam periode 1981 - 1987 itu neraca perdagangan Indonesia juga berfluktuasi naik turun, yaitu dari tahun 1981 - 1983 cenderung menurun, kemudian meningkat agak cukup tinggi pada tahun 1984. Dan bertahan pada tahun 1985, selanjutnya anjlok agak tajam pada tahun 1986 untuk kemudian agak sedikit meningkat pada tahun 1987. Namun demikian secara keseluruhannya dalam periode 1981 - 1987 tersebut telah terjadi kecenderungan pe-

TABEL 2.2.

NEGARA PERDAGANGAN INDONESIA SECARA KESELURUHANNYA DAN
DENGAN NEGARA-NEGARA TERTENTU
1981-87 (US \$ JUTA)

U r a i a n	T a h u n			
	1981	1983	1985	1987
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Neraca Perdagangan	10.540	4.795	8.366	4.765
Ekspor (X)	23.810	21.146	18.580	17.135
Impor (M)	13.270	16.351	10.214	12.370
PERSENTASE BAGIAN TERHADAP TOTAL X KE:				
1. Negara-Negara Industri	60,5	65,4	70,3	76,7
Amerika Serikat	18,3	20,2	21,7	19,5
Jepang	48,0	45,8	46,3	43,2
M E E	5,7	5,9	7,7	11,2
2. Negara-Negara Berkembang	35,6	30,2	25,9	19,9
NICs Asia ^{a)}	12,8	18,2	16,1	15,2
A S E A N ^{b)}	11,9	16,4	10,7	7,5
3. Negara-Negara Lainnya	3,9	4,4	3,8	3,4
PERSENTASE BAGIAN TERHADAP TOTAL M DARI:				
1. Negara-Negara Industri	58,0	59,2	62,5	73,4
Amerika Serikat	13,5	15,5	16,5	11,4
Jepang	30,1	23,2	26,3	29,1
M E E	17,6	13,3	17,0	16,0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Negara-Negara Berkembang	37,6	35,3	33,0	23,0
NICs Asia ^{a)}	16,6	26,8	13,1	12,6
ASEAN ^{b)}	12,8	23,7	8,8	5,7
3. Negara-Negara Lainnya	4,4	5,5	4,5	3,6

Keterangan :

- a) Termasuk Singapura, tetapi tidak termasuk Brunei Darussalam yang hanya dalam jumlah kecil.
- b) Termasuk juga Singapura.

Sumber : Dikutip dan dihitung dari data IMF, Direction of Trade Statistics: Yearbook 1988 dan disesuaikan/dilengkapi dengan data BPS. Ekspor dan Impor: Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia (Beberapa Tahun Penerbitan).

nurunan neraca perdagangan dengan laju pertumbuhan rata-rata -12,4% pertahun.

Ditinjau dari posisi dan pola arah perdagangan antara Indonesia dengan luar negeri, menurut kelompok-kelompok negara dan negara-negara mitra dagangnya dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut. Pertama-tama jika jika dihitung dari data yang tersedia, ternyata bahwa dalam periode 1981 - 1987 laju pertumbuhan nilai ekspor Indonesia ke kelompok negara industri (-5%) menurun relatif tidak sebesar penurunan ke kelompok negara berkembang yang sebesar -8,5% rata-rata pertahun. Apalagi dari segi impornya, jika impor Indonesia dari kelompok negara industri menurun dengan laju pertumbuhan rata-rata -1,0% pertahun, maka impor dari kelompok negara berkembang menurun dengan laju pertumbuhan rata-rata -10,2% pertahun. Sebagai akibat dari perkembangan tersebut di atas maka persentase bagian ekspor ke negara-negara industri telah cenderung meningkat terus dari 60,5% (1981) sehingga mencapai 76,7% (1987), dengan rata-rata 68,4% selama periode tersebut. Sedangkan persentase bagian ekspor ke negara-negara berkembang (termasuk NICs) telah cenderung menurun terus dari 35,6% (1981) sehingga menjadi 19,9% (1987), dengan rata-rata 27,7% pada periode yang sama. Dan persentase bagian ekspor ke negara-negara lainnya tidak begitu banyak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, yang dalam peri-

ode 1981 - 1987 itu adalah rata-rata sebesar 3,9% dari total ekspor Indonesia keseluruhannya .

Selanjutnya dari segi impor persentase bagian impor dari negara-negara industri juga cenderung meningkat yaitu dari 58,0% (1981) sehingga mencapai 73,4% (1987), dengan rata-rata 63,6% dalam periode 1981 - 1987 itu. Sedangkan persentase bagian impor dari negara-negara industri telah cenderung menurun terus, yaitu dari 37,6% (1981) sehingga menjadi 23,0% (1987), dengan rata-rata sebesar 37,7% dalam periode yang sama. Dan persentase bagian impor dari negara lainnya hanya sedikit saja perubahannya dari tahun ke tahun, yang dalam periode 1981 - 1987 itu adalah rata-rata sebesar 4,7% dari total impor Indonesia keseluruhannya.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai perkembangan perdagangan ekspor dan impor Indonesia baik secara totalitas maupun dalam hal pola arah perdagangannya dengan kelompok negara dan negara-negara tertentu dalam periode 1981 - 1987 dapat dilihat pada tabel 2.2. di atas.

Dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa dalam periode 1981 - 1987 persentase bagian ekspor ke Amerika Serikat rata-rata 19,4%, ke Jepang rata-rata 46,5%, ke MEE rata-rata 7,5% dari total ekspor Indonesia. Sedangkan persentase bagian ekspor Indonesia ke NICs Asia rata-rata 15,0% dan ke ASEAN rata-rata 11,0% dari total

ekspor Indonesia. Dalam hal impor, dalam periode yang sama persentase bagian impor Indonesia dari Amerika Serikat rata-rata 14,3%, dari Jepang rata-rata 26,7% dan dari MEE rata-rata 16,1% dari total impor Indonesia. Sedangkan persentase bagian impor Indonesia dari NICs Asia rata-rata 17,7% dan dari ASEAN rata-rata 13,6% dari jumlah impor Indonesia keseluruhannya.

Dapat disimpulkan bahwa dalam periode 1981 - 1987 perdagangan ekspor maupun impor Indonesia dengan kelompok negara industri maupun dengan kelompok negara berkembang cenderung menurun. Akan tetapi penurunan perdagangan itu relatif besar dengan negara-negara berkembang sendiri cenderung menurun sedangkan dengan negara-negara maju cenderung meningkat. Ini berarti masih terjadi kecenderungan peningkatan arah pola perdagangan Indonesia dengan negara-negara industri dibandingkan dengan negara-negara berkembang sendiri.

Jika diperhatikan dan dihitung lebih lanjut khusus mengenai nilai ekspor Indonesia dari data-data BPS, (1987 : VIII) maka ternyata bahwa jika pada tahun-tahun sebelumnya ekspor migas selalu lebih besar dari ekspor non-migas, maka tahun 1987 ekspor non-migas telah melebihi ekspor migas. Dimana pada tahun 1987 itu ekspor non-migas sebesar US\$.8.579,5 juta, sedangkan ekspor migas sebesar US\$.8.556,1 juta. Selanjutnya dapat ditambahkan data-data dari Sidang Kabinet Terbatas Bidang

EKUIN tanggal 8 Juni 1988, yang menunjukkan bahwa jika pada tahun 1986/1987 ekspor non-migas (US\$.6,5 milyar) masih dibawah ekspor migas (US\$.7,4 milyar), maka pada tahun 1987/1988 ekspor non-migas (US\$.9,4 milyar) sudah melampaui ekspor migas (US\$.8,9 milyar). Kompas, (Kamis 9 Januari 1988).

B A B I I I
M E T O D O L O G I

3.1. Kerangka Konseptual

Sebelum penulis memasuki pembahasan skripsi ini yaitu pengaruh kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988 terhadap perkembangan komoditi ekspor non-migas Sulawesi Selatan dengan mengambil data pada Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Biro Pusat Statistik, maka penulis terlebih dahulu membahas beberapa pengertian teori yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini seperti pengertian deregulasi, tujuan Pakto 27, pengertian perdagangan internasional dan reformasi sistem dan kebijaksanaan ekspor serta dikemukakan pula ekspor bagi negara-negara sedang berkembang sebagai bahan perbandingan terhadap perdagangan Sulawesi Selatan.

Kemudian penulis akan memperlihatkan data mengenai ketujuh jenis komoditi andalan ekspor non-migas Sulawesi Selatan baik volume maupun nilainya serta data ekspor keseluruhan Propinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari volume dan nilainya.

Akhirnya penulis menganalisa pengaruh kebijaksanaan Pakto 27 terhadap beberapa jenis komoditi andalan ekspor non-migas Sulawesi Selatan baik sesudah maupun sebelumnya.

3.2. Metode Penelitian

Dalam menyajikan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya maka diperlukan adanya dukungan data sebagai bahan pembahasan agar hal-hal yang akan dibahas dapat lebih mendekati keadaan yang sebenarnya.

Berkaitan dengan pengumpulan data yang menjadi dasar dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (library research).

Yaitu penelitian yang diarahkan pada teori-teori ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi ini dan dilakukan dengan jalan menelaah, memahami serta menganalisa teori-teori yang dikemukakan oleh para sarjana melalui buku-buku karya ilmiah.

2. Penelitian lapangan (field research).

Yaitu penelitian langsung ditempat mana sedang berlangsungnya suatu kegiatan untuk mengumpulkan fakta-fakta atau data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam penelitian lapangan, penulis melakukan wawancara yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada pejabat yang menangani secara langsung pengelolaan masalah perkembangan komoditi ekspor non-migas terhadap kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988. Seperti data ekspor non-migas Sulawesi Selatan di Kanwil Perdagangan Propinsi Sula-

wesi Selatan.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder, sedangkan sumber datanya berasal dari instansi-instansi atau kantor-kantor yang menjadi sumber informasi seperti :

1. Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang.
2. Kantor Biro Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang.

3.4. Metode Analisis

Untuk mengetahui perbandingan atau pengaruh kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober terhadap perkembangan komoditi ekspor non-migas Sulawesi Selatan, maka penulis menggunakan metode analisa komparatif, yaitu menganalisa secara kuantitatif dan kualitatif.

Analisa secara kualitatif dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang diadakan di perpustakaan dengan tujuan membandingkan keterangan-keterangan dan data-data yang bersifat teoritis dari buku-buku yang ada hubungannya dengan materi pembahasan.

Analisa secara kuantitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder dari departemen-departemen yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini.

B A B IV :

DISKRIPSI KEADAAN PERKEMBANGAN EKSPOR NON MIGAS SULAWESI SELATAN

4.1. Perkembangan Volume Ekspor Non Migas Sulawesi Selatan

Kegiatan ekonomi di Sulawesi Selatan tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan sendiri (subsistance) tetapi lebih meningkat lagi pada produksi dan ekspor ke beberapa negara dengan tujuan komersil. Hal ini diakibatkan oleh adanya perkembangan ekonomi yang semakin meningkat yang sekaligus meningkatkan permintaan yang efektif dan merangsang peningkatan produksi. Khusus komoditi kopi, udang, gaplek, teripang, rumput laut, dan biji coklat serta telur ikan terbang, yang secara spesifik telah pula menonjol produksi dan ekspornya di daerah Sulawesi Selatan, sehingga disamping akan menambah devisa, juga akan menambah pendapatan masyarakat.

Adapun perkembangan volume ketujuh komoditi ekspor non-migas Sulawesi Selatan selama enam tahun (1984-1989) secara kuantitatif akan dikemukakan dalam tabel 4.1. sebagai berikut.

TABEL 4.1.
 PERKEMBANGAN VOLUME KETUJUH KOMODITI EKSPOR
 NON MIGAS SULAWESI SELATAN 1984 - 1989

No. Jenis Komoditi	T a h u n (Ton)					
	1984	1985	1986	1987	1988	1989
1. K o p i	4.516	4.787	6.101,9	4.420,4	2.482,0	3.206,8
2. U d a n g	2.850	2.469	2.814,4	3.247,2	4.410,5	4.672,1
3. G a p l e k	12.475	20.870	13.900,0	25.350,0	29.200,8	41.385,3
4. Teripang	1.176	2.603	1.688,9	1.669,4	1.735,9	1.423,2
5. Rumput Laut	2.631	3.252	2.685,5	2.837,5	3.751,1	4.262,9
6. Biji Coklat	2.986	4.953	8.090,5	14.803,8	26.862,6	38.796,3
7. T. Ikan Terbang	219	185	175,2	118,5	194,4	203,0
Jumlah	26.853	39.119	35.456,4	52.446,8	68.637,3	93.949,6

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propensi Sula-
 wesi Selatan

- Data diolah kembali.

Berdasarkan tabel 4.1. di atas dapat diketahui perkembangan volume ketujuh komoditi ekspor non-migas di Sulawesi Selatan yaitu ekspor kopi, udang, gaplek, teripang, rumput laut, biji coklat, dan telur ikan terbang. Volume ekspor ketujuh komoditi Sulawesi Selatan tersebut agaknya mengalami perkembangan yang berfluktuasi selama periode yang dianalisa. Terbukti, untuk jenis komoditi kopi pada tahun 1984 eksportnya sebesar 4.516 ton kemudian pada tahun 1985 eksportnya mengalami peningkatan menjadi sebesar 4.787 ton. Selanjutnya pada tahun 1986 mengalami kenaikan ekspor menjadi 6.101,9 ton dan pada tahun 1987 eksportnya mengalami penurunan menjadi sebesar 4.420,4 ton seterusnya pada tahun 1988 tetap mengalami penurunan menjadi sebesar 2.482 ton tetapi pada tahun akhir penelitian mengalami kenaikan menjadi 3.206,8 ton.

Selanjutnya untuk jenis komoditi udang pada tahun 1984 eksportnya sebesar 2.350 ton, tetapi pada tahun 1985 mengalami penurunan ekspor menjadi sebesar 2.469 ton. Pada tahun 1986 volume ekspor udang tersebut mengalami kenaikan menjadi sebesar 2.814,4 ton dan seterusnya pada tahun 1987 volume ekspor menjadi sebesar 3.247,2 ton dan pada tahun 1988 volume eksportnya menunjukkan angka sebesar 4.410,5 ton serta pada tahun akhir penelitian yaitu tahun 1989 ekspor udang tetap mengalami kenaikan menjadi sebesar 4.672,1 ton.

Kemudian untuk jenis komoditi gaplek yang merupa-

kan hasil pertanian Sulawesi Selatan menunjukkan volume ekspor yang menggembirakan terlihat pada tahun 1984 besarnya ekspor tersebut sebesar 12.475 ton, kemudian pada tahun 1985 volume ekspor mengalami kenaikan menjadi sebesar 20.870 ton, pada tahun 1986 volume eksportnya mengalami penurunan menjadi sebesar 13.900 ton dan pada tahun 1987 volume ekspor gaplek tersebut mengalami kenaikan yang cukup tajam yaitu sebesar 25.350 ton. Pada tahun berikutnya volume ekspor mencapai sebesar 29.200,8 ton dan pada tahun 1989 volume tersebut meningkat menjadi 41.385,1 ton.

Untuk jenis komoditi teripang perkembangannya mengalami fluktuasi terlihat pada tabel 4.1. tahun 1984 volumenya mencapai 1.176 ton, pada tahun 1985 volume ekspor teripang tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 1984 yaitu menjadi 2.603 ton. Selanjutnya pada tahun 1986 volume eksportnya turun menjadi sebesar 1.638,9 ton, kemudian pada tahun 1987 volume eksportnya tetap mengalami penurunan menjadi sebesar 1.669,4 ton jika dibandingkan dengan tahun 1986. Dan pada tahun 1988 volume ekspor teripang tersebut kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 1.735,9 ton atau naik sebesar 66,5 ton. Serta pada tahun 1989 volume eksportnya kembali mengalami penurunan volume sebesar 312,7 ton atau menjadi sebesar 1.423,2 ton.

Selanjutnya untuk jenis komoditi rumput laut yang

merupakan hasil pertanian di sub sektor perikanan terlihat bahwa volume ekspor yang merupakan ekspor non-migas Sulawesi Selatan menunjukkan jumlah sebesar 2.631 ton untuk tahun 1984. Pada tahun 1985 volume ekspor rumput laut mengalami peningkatan menjadi sebesar 3.252 ton atau naik sebesar 621 ton bila dibandingkan dengan tahun 1984. Selanjutnya pada tahun 1986 volume ekspor rumput laut tersebut mengalami penurunan ekspor sebesar 566,5 ton atau menjadi sebesar 2.685,5 ton. Kemudian pada tahun 1987 volume eksportnya kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 2.837,5 ton atau naik sebesar 152 ton bila dibandingkan dengan tahun 1986. Pada tahun 1988 volume komoditi rumput laut itu tetap mengalami kenaikan menjadi sebesar 3.751,1 ton dan pada tahun 1989 volume tersebut mencapai 4.262,9 atau terjadi kenaikan sebesar 511,8 ton.

Dan untuk komoditi biji coklat yang merupakan hasil pertanian di sektor perkebunan, terlihat mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan yaitu dapat dilihat pada tabel 4.1. tahun 1984 volume eksportnya mencapai 2.986 ton. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 1985 volume eksportnya mengalami peningkatan menjadi sebesar 4.953 ton atau naik sebesar 1.967 ton. Selanjutnya pada tahun 1986 volume ekspor biji coklat tersebut tetap mengalami kenaikan menjadi sebesar 8.090,5 ton atau naik sebesar 3.137,5 ton. Pada tahun 1987 volume eksportnya mengalami

peningkatan dari 8.090,5 ton menjadi 14.803,8 ton atau naik sebesar 12.058,8 ton, selanjutnya pada tahun 1988 perkembangan volume komoditi biji coklat tersebut sangat baik karena volume ekspornya mengalami peningkatan sebesar 12.058,8 ton atau menjadi sebesar 26.862,6 ton dan pada tahun 1989 volume ekspor tersebut tetap mengalami kenaikan menjadi sebesar 38.796,3 ton.

Serta jenis komoditi telur ikan terbang yang merupakan hasil perikanan laut yang perkembangannya kurang menggembirakan terlihat pada tahun 1984 volume ekspornya mencapai 219 ton, pada tahun 1985 ekspornya mengalami penurunan menjadi sebesar 185 ton, kemudian pada tahun 1986 volume ekspor telur ikan terbang tersebut terus mengalami penurunan menjadi sebesar 175,2 ton atau turun sebesar 9,8 ton. Selanjutnya volume ekspor telur ikan terbang pada tahun 1987 tetap mengalami penurunan menjadi sebesar 118,5 ton, tetapi pada tahun 1988 volume ekspornya mengalami kenaikan menjadi sebesar 194,4 ton dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 1989 yaitu menjadi sebesar 203 ton atau mengalami kenaikan sebesar 8,6 ton jika dibandingkan dengan tahun 1988.

Melihat perkembangan dari beberapa jenis komoditi ekspor non-migas yang sifatnya berfluktuasi maka secara umum dapat dilihat perkembangannya yaitu pada tahun 1984 jumlah jenis komoditi secara keseluruhan berjumlah 26.853 ton, pada tahun 1985 jumlahnya mengalami pening-

katan menjadi sebesar 39.119 ton, dan pada tahun 1986 jumlah jenis komoditi yang diteliti mengalami penurunan volume eksportnya menjadi sebesar 35.456,4 ton atau terjadi penurunan sebesar 3.662,6 ton. Pada tahun 1987 volume ketujuh komoditi ekspor non-migas kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 5.446,8 ton atau naik menjadi 16.990,4 ton. Pada tahun 1988 volume ketujuh komoditi ekspor non-migas tersebut tetap mengalami kenaikan menjadi sebesar 68.637,3 ton atau naik menjadi sebesar 16.190,5 ton. Sedangkan pada tahun 1989 jumlah volume ketujuh komoditi ekspor non-migas tersebut tetap mengalami kenaikan bahkan kenaikannya cukup tajam yaitu dari 68.637,3 ton menjadi 93.949,6 ton atau naik sebesar 25.312,3 ton.

Dari ketujuh jenis komoditi ekspor non-migas pada tahun 1984 terlihat bahwa volume gaplek yang terbesar di antara keenam jenis komoditi yang diteliti, selanjutnya pada tahun 1985 jenis komoditi terbesar yaitu gaplek kemudian disusul jenis komoditi biji coklat. Dan pada tahun 1986 jenis komoditi terbesar tetap didominasi oleh komoditi gaplek. Selanjutnya pada tahun 1987 jenis komoditi gaplek tetap mendominasi jumlah volume ekspor non-migas, dan seterusnya sampai pada tahun 1989 yaitu besarnya volume ekspor gaplek adalah 41.385,3 ton. Kemudian disusul jenis komoditi biji coklat yang merupakan hasil pertanian di sub sektor perkebunan.

4.2. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Sulawesi Selatan

Setelah kita melihat perkembangan dari volume ketujuh komoditi ekspor non migas tersebut di atas dari tahun yang diteliti, maka dapatlah dikatakan bahwa perkembangan volume ekspornya cukup cerah, terlihat pada awal tahun penelitian yaitu pada tahun 1984 jumlah seluruh volume ekspornya mencapai sebanyak 26.853 ton dan pada akhir penelitian mengalami peningkatan yang cukup tajam yaitu menjadi sebanyak 93.949,6 ton.

Selanjutnya dari ketujuh jenis komoditi ekspor non migas Sulawesi Selatan tersebut di atas yang paling sedikit volume ekspornya adalah jenis komoditi telur ikan terbang dan yang terbesar volume ekspornya adalah jenis komoditi gaplek.

Melihat perkembangan volume ekspor tersebut, maka dapat pula penulis memperlihatkan perkembangan nilai ketujuh komoditi ekspor non migas Sulawesi Selatan selama enam tahun (1984 - 1989), sebagai berikut :

TABEL 4.2.

PERKEMBANGAN NILAI KETUJUHAN KOMODITI EKSPOR
NON MIGAS SULAWESI SELATAN 1984-1989

No. Jenis Komoditi	T a h u n (US.\$)					
	1984	1985	1986	1987	1988	1989
1. K o p i	11.369.807	12.769.615	19.235.109	9.981.331	6.474.497	7.536.056
2. U s a n g	26.960.250	23.205.601	33.104.790	36.301.956	50.841.140	45.121.768
3. G a p l e k	477.870	1.704.790	1.608.849	2.714.557	3.045.490	2.716.064
4. Teripang	1.145.326	2.629.543	2.010.365	2.531.960	3.950.324	4.665.101
5. Rumput Laut	449.224	913.084	923.422	875.452	1.207.411	2.178.254
6. Biji Coklet	5.337.696	9.262.365	13.019.462	23.265.552	32.403.335	38.077.784
7. T.Iken Terbang	3.796.279	2.552.121	2.375.293	2.724.481	6.133.713	5.637.190
J u m l a h	50.036.952	53.042.124	72.232.296	78.445.289	104.105.915	105.932.217

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan

- Data diolah kembali.

Berdasarkan tabel 4.2. di atas dapat diketahui perkembangan nilai ketujuh komoditi ekspor non-migas di Sulawesi Selatan. Nilai ekspor ketujuh komoditi tersebut mengalami perkembangan yang berfluktuasi selama periode yang dianalisa kecuali jenis komoditi biji coklat. Terbukti, untuk jenis komoditi kopi pada tahun 1984 nilai eksportnya sebesar US.\$11.369.807,- kemudian pada tahun 1985 mengalami peningkatan nilai ekspor menjadi sebesar US.\$12.769.615,-. Selanjutnya pada tahun 1986 mengalami kenaikan nilai ekspor menjadi sebesar US.\$19.235.109,- dan pada tahun 1987 nilai eksportnya mengalami penurunan menjadi sebesar US.\$9.981.331,- hingga tahun 1988 menjadi sebesar US.\$6.474.497,-. Tetapi pada tahun 1989 nilai ekspor tersebut naik menjadi sebesar US.\$7.536.056,-.

Selanjutnya untuk jenis komoditi udang pada tahun 1984 nilai eksportnya sebesar US.\$26.960.250,- tetapi pada tahun 1985 mengalami penurunan nilai ekspor menjadi sebesar US.\$23.205.601,-. Pada tahun 1986 nilai ekspor udang tersebut mengalami peningkatan menjadi sebesar US.\$33.104.790,- dan pada tahun berikutnya tetap mengalami kenaikan menjadi sebesar US.\$36.301.956,-. Kemudian pada tahun 1988 nilai ekspor udang tersebut mengalami kenaikan menjadi US.\$50.841.140,- dan tahun 1989 mengalami penurunan nilai ekspor menjadi sebesar US.\$45.121.768,-.

Kemudian untuk jenis komoditi gaplek yang merupakan hasil pertanian Sulawesi Selatan menunjukkan nilai ekspor sebesar US\$.477.870,- kemudian pada tahun 1985 nilai ekspor mengalami kenaikan menjadi US\$.1.704.790, tetapi pada tahun 1986 nilai ekspornya mengalami penurunan menjadi sebesar US\$.1.608.849,-. Pada tahun 1987 nilai ekspor gaplek tersebut menjadi US\$.2.714.557,- atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan nilai ekspor pada tahun 1986 dan pada tahun 1988 nilai ekspor gaplek tersebut tetap mengalami kenaikan menjadi sebesar US\$.3.045.490,- dan pada tahun 1989 mengalami penurunan menjadi sebesar US\$.2.716.064,-.

Untuk jenis komoditi teripang perkembangannya mengalami pula fluktuasi terlihat pada tahun 1984 nilai ekspornya sebesar US\$.1.145.826,- selanjutnya pada tahun 1985 mengalami peningkatan nilai menjadi sebesar US\$.2.629.548,-. Pada tahun 1986 nilai ekspornya mencapai sebesar US\$.2.010.365,- atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 1985. Pada tahun 1987 nilai ekspor teripang kembali mengalami kenaikan menjadi US\$.2.581.960,- dan berlanjut hingga tahun 1989 menjadi sebesar US\$.4.665.101,-.

Selanjutnya untuk jenis komoditi rumput laut yang merupakan hasil pertanian di sub sektor perikanan terlihat bahwa nilai ekspornya menunjukkan jumlah sebesar US\$.449.224,- untuk tahun 1984. Pada tahun 1985 nilai

eksportnya mengalami kenaikan yang cukup tajam yaitu menjadi sebesar US.\$918.084,- kemudian pada tahun 1986 tetap mengalami kenaikan menjadi sebesar US.\$928.422,- tetapi pada tahun 1987 nilai ekspor tersebut mengalami penurunan menjadi sebesar US.\$875.452,-. Tetapi sebaliknya pada tahun 1988 nilai ekspor tersebut kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar US.\$1.207.411,- hingga pada tahun 1989 menjadi sebesar US.\$2.178.254.

Untuk jenis komoditi biji coklat perkembangannya cukup baik, terlihat pada tahun 1984 nilai eksportnya mencapai sebesar US.\$5.887.696,-. Apabila nilai ekspor biji coklat pada tahun 1985 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka nilai eksportnya mengalami kenaikan menjadi sebesar US.\$9.262.365,- selanjutnya pada tahun 1986 nilai ekspor tersebut tetap mengalami kenaikan menjadi sebesar US.\$13.019.462,-. Pada tahun berikutnya nilai ekspor biji coklat mencapai US.\$23.265.552,- atau mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan nilai ekspor pada tahun 1986. Selanjutnya pada tahun 1988 nilai ekspor tersebut tetap mengalami kenaikan menjadi sebesar US.\$32.403.335,- dan pada tahun 1989 nilai eksportnya mengalami kenaikan menjadi US.\$38.077.784,-.

Dan untuk jenis komoditi telur ikan terbang yang merupakan hasil perikanan laut yang perkembangannya kurang menggembirakan, terlihat pada tahun 1984 jumlah nilai eksportnya mencapai sebesar US.\$3.796.279,- pada

tahun 1985 nilai eksportnya mengalami penurunan nilai
 menjadi sebesar US.\$2.552.121,- kemudian pada tahun
 1986 nilai ekspor telur ikan terbang tersebut tetap me-
 ngalami penurunan menjadi sebesar US.\$2.375.298,- te-
 tapi pada tahun 1987 nilai ekspor tersebut mengalami
 kenaikan menjadi sebesar US.\$2.724.481,- dan pada ta-
 hun 1988 nilai tersebut mengalami kenaikan yang cukup
 besar menjadi sebesar US.\$6.183.718,- serta pada tahun
 1989 nilai ekspor tersebut mengalami penurunan menjadi
 sebesar US.\$5.637.190,-.

Melihat perkembangan dari beberapa jenis komoditi
 ekspor non-migas yang sifatnya berfluktuasi, tetapi se-
 cara keseluruhan jumlah nilai ekspor ketujuh jenis ko-
 moditi non-migas mengalami perkembangan yang cukup baik,
 yaitu dapat dilihat pada tahun 1984 jumlah keseluruhan
 nilai eksportnya sebesar US.\$50.086.952,- pada tahun
 1985 nilai ekspor tersebut mengalami peningkatan menja-
 di sebesar US.\$53.042.124,- selanjutnya pada tahun
 1986 nilai ekspor tersebut tetap mengalami peningkatan
 menjadi sebesar US.\$72.282.296,-. Kemudian pada tahun
 1987 nilai ekspor ketujuh jenis komoditi tersebut tetap
 mengalami kenaikan menjadi sebesar US.\$78.445.289,-.
 Dan pada tahun 1988 nilai ekspor tersebut mengalami pe-
 ningkatan menjadi sebesar US.\$104.105.915,- serta pada
 tahun 1989 nilai ekspor tersebut tetap mengalami kena-
 ikan menjadi sebesar US.\$105.932.217,-.

TABEL 4.3.
 PERKEMBANGAN NILAI EKSPOR SULAWESI SELATAN
 (1984 - 1989)

Tahun	Jumlah Ekspor (US \$)	Perubahan		Keterangan
		Satuan	%	
1984	200.539.155	- 6.404.835	- 3,19	turun
1985	194.134.320	33.621.069	17,32	naik
1986	227.755.389	50.606.365	22,22	naik
1987	278.361.754	174.367.137	62,64	naik
1988	452.728.891	93.052.471	20,55	naik
1989	545.781.362			

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propensi Sulawesi Selatan.

- Data diolah kembali

Tabel 4.3. tersebut di atas menunjukkan bahwa selama enam tahun ekspor Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun cukup baik, hanya saja pada tahun 1985 jumlah ekspor tersebut mengalami penurunan sebesar US\$.6.404.835,- atau menjadi sebesar US\$.194.134.320,- dengan perubahan prosentase 3,19 %. Pada tahun 1986 nilai ekspor tersebut menjadi sebesar US\$.227.755.389,- atau mengalami kenaikan sebesar US\$.33.621.069,- jika dibandingkan dengan tahun 1985 atau peningkatannya 17,32 %. Selanjutnya pada tahun 1987 nilai ekspor mengalami peningkatan dari sebesar US\$.227.755.339,- menjadi sebesar US\$.278.361.754,- atau kenaikannya sebesar US\$.50.606.365,- atau naik 22,22 %. Kemudian peningkatan itu berlanjut lagi pada tahun 1988, yakni sebesar US\$.174.367.137,- atau menjadi sebesar US\$.452.728.891,- dengan prosentase kenaikan 62,64 %. Dan pada tahun 1989 nilai ekspor tersebut berlanjut menjadi sebesar US\$.545.781.362,- dengan tingkat kenaikan sebesar 20,55 % atau peningkatannya sebesar US\$.93.052.471,-.

Kemudian peranan ketujuh ekspor non-migas Sulawesi Selatan dalam hal kontribusinya terhadap jumlah ekspor Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada tabel 4.4. sebagai berikut :

TABEL 4.4.
 KONTRIBUSI KETUJUH EKSPOR NON MIGAS TERHADAP
 JUMLAH EKSPOR SULAWESI SELATAN
 1984 - 1989

Tahun	Jumlah Ekspor (US \$)	Ketujuh Ekspor Non Migas (US \$)	Kontribusi Ekspor (%)
1984	200.539.155	50.086.952	24,98
1985	194.134.320	53.042.124	27,32
1986	227.755.389	72.282.296	31,74
1987	278.361.754	78.445.289	28,18
1988	452.728.891	104.105.915	22,99
1989	545.781.362	105.932.217	19,41

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propensi Sulawesi Selatan.

- Data diolah kembali.

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa kontribusi ketujuh ekspor non-migas Sulawesi Selatan terhadap jumlah ekspor Sulawesi Selatan mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan selama periode 1984 - 1989. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pula nilai ekspor komoditi lain. Tetapi kontribusi ketujuh ekspor non-migas terhadap jumlah ekspor Sulawesi Selatan dapat bertahan rata-rata 25,77 % setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi ketujuh ekspor non migas tersebut terhadap jumlah ekspor Sulawesi Selatan cukup besar yaitu rata 25,77 % setiap tahun selama periode 1984-1989.

B A B V

ANALISIS PENGARUH KEBIJAKSANAAN PAKTO 27 TERHADAP KETUJUH EKSPOR NON MIGAS SULAWESI SELATAN

5.1. Perkembangan Ketujuh Jenis Komoditi Ekspor Non Migas Sebelum Pakto 27.

Sebelum penulis mengemukakan pengaruh kebijaksanaan pemerintah Pakto 27 tahun 1988 terhadap ekspor non migas utamanya ketujuh jenis komoditi tersebut di daerah Sulawesi Selatan, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan perkembangan ketujuh jenis komoditi ekspor sebelum ada kebijaksanaan Paket 27 Oktober 1988.

Sebenarnya perkembangan ekspor non-migas sebelum adanya kebijaksanaan tersebut sifatnya berfluktuasi artinya perkembangannya kadang naik dan kadang turun pada tahun tertentu, tetapi dari ketujuh jenis komoditi yang dipilih/diteliti sebagai sampel yang merupakan komoditi ekspor yang utama hanya ada satu jenis komoditi yang mempunyai perkembangan yang cukup baik yaitu jenis komoditi biji coklat.

Untuk lebih jelasnya dapat penulis memperlihatkan perkembangan ketujuh jenis komoditi ekspor non-migas tersebut pada tabel 5.1. berikut :

PERKEMBANGAN KETUJUH JENIS KOMODITI EKSPOR
NON MIGAS SULAWESI SELATAN SEBELUM PAKTO 27

No. Jenis Komoditi	Volume (ton)							Nilai (US \$)		
	1984	1985	1986	1987	1984	1985	1986	1987	1988	1989
1. K o p i	4.516	4.787	6.101,9	2.482,0	11.569.807	12.769.615	19.235.109	9.981.331		
2. U d a n g	2.850	2.469	2.814,4	4.410,5	26.960.250	23.205.601	33.104.790	36.301.956		
3. G a p l e k	12.475	20.870	13.900,0	29.200,8	477.870	1.704.790	1.608.849	2.714.557		
4. Teripang	1.176	2.603	1.688,9	1.735,9	1.145.826	2.629.548	2.010.365	2.581.960		
5. Rumput Laut	2.631	3.252	2.635,5	2.837,5	449.224	918.084	928.422	875.452		
6. Biji Coklat	2.986	4.953	8.090,5	14.803,8	5.887.696	9.262.365	13.019.462	23.265.552		
7. T. Ikan Terbang	219	185	175,2	118,5	3.796.279	2.552.121	2.375.298	2.724.481		
J u m l a h	26.853	39.119	35.456,4	52.446,8	50.086.952	53.042.124	72.282.296	78.445.289		

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propensi Sulawesi Selatan

- Data diolah kembali.

Pada tabel 5.1. di atas dapat diketahui perkembangan volume dan nilai ketujuh jenis komoditi ekspor non-migas Sulawesi Selatan, dalam hal ini volume dan nilai ekspor kopi, udang, gaplek, teripang, rumput laut dan biji coklat serta telur ikan terbang. Seperti telah diuraikan di atas bahwa jenis komoditi biji coklat mengalami perkembangan yang cukup baik terlihat pada tahun 1984 volume eksportnya sebanyak 2.986 ton dengan nilai sebesar US.\$5.887.696,- selanjutnya pada tahun 1985 baik volume maupun nilainya mengalami perkembangan yaitu masing-masing menjadi 4.953 ton dan sebesar US.\$9.262.365,- kemudian pada tahun 1986 tetap mengalami kenaikan volume menjadi sebanyak 8.090,5 ton dan dengan nilai sebesar US.\$13.019.462,- dan pada tahun 1987 volume dan nilai ekspor jenis komoditi biji coklat mengalami kenaikan menjadi sebanyak 14.803,8 ton dengan nilai sebesar US.\$23.265.552,-.

Selanjutnya dari keenam jenis komoditi ekspor non migas di luar jenis komoditi biji coklat, agaknya mengalami perkembangan yang berfluktuasi selama periode yang dianalisa. Terbukti, pada tahun 1984 dan tahun 1985 volume dan nilai jenis komoditi kopi mengalami kenaikan dari 4.516 ton menjadi 4.787 ton dengan nilai dari US.\$11.369.807,- menjadi US.\$12.769.615,-. Kemudian pada tahun 1986 baik volume maupun nilainya tetap mengalami kenaikan menjadi 6.101,9 ton dengan nilai se-

besar US.\$19.235.109,- tetapi pada tahun 1987 volume eksportnya mengalami penurunan menjadi sebanyak 2.482,0 ton dengan nilai sebesar US.\$9.981.331,-.

Kemudian untuk komoditi udang pada tahun 1984 dan tahun 1985 baik volume maupun nilainya mengalami penurunan yaitu dari 2.850 ton menjadi 2.469 ton dengan nilai dari US.\$26.960.250,- menjadi US.\$23.205.601,-. Sebaliknya pada tahun 1986 volume ekspor mengalami kenaikan menjadi sebanyak 2.814,4 ton dengan nilai sebesar US.\$33.104.790,- dan pada tahun 1987 volume ekspor udang tersebut bertambah menjadi sebanyak 4.410,5 ton yang diikuti oleh peningkatan nilai eksportnya menjadi sebesar US.\$36.301.956,-.

Untuk jenis komoditi gapek pada tahun 1984 volume eksportnya sebanyak 12.475 ton dengan nilai sebesar US.\$477.870,- pada tahun 1985 volume eksportnya mengalami peningkatan menjadi sebanyak 20.870 ton dengan nilai sebesar US.\$1.704.790,- kemudian pada tahun 1986 baik volume maupun nilainya mengalami penurunan menjadi sebanyak 13.900,0 ton dan nilainya US.\$1.608.849,- dan pada tahun 1987 volume ekspor tersebut kembali mengalami kenaikan menjadi sebanyak 29.200,8 ton dengan nilai sebesar US.\$2.714.557,-.

Untuk jenis komoditi teripang volume eksportnya sebanyak 1.176 ton dengan nilai sebesar US.\$1.145.826,- untuk tahun 1984 dan pada tahun 1985 volume eksportnya

mengalami peningkatan menjadi sebanyak 2.603 ton dan diikuti oleh peningkatan nilai eksportnya menjadi sebesar US\$.2.629.548,- pada tahun 1986 volume ekspor teripang tersebut mengalami penurunan menjadi sebanyak 1.688,9 ton dengan nilai sebesar US\$.2.010.365,- dan pada tahun 1987 volume eksportnya kembali mengalami kenaikan menjadi sebanyak 1.735,9 ton dengan nilai sebesar US\$.2.581.960,-.

Selanjutnya untuk jenis komoditi rumput laut yang merupakan hasil perikanan terlihat bahwa perkembangan volume dan nilai eksportnya berfluktuasi selama periode 1984 - 1987. Terbukti pada tahun 1984 volume eksportnya menjadi sebanyak 2.631 ton dengan nilai ekspor sebesar US\$.449.224,- pada tahun 1985 terjadi kenaikan volume dan nilai ekspor masing-masing menjadi sebanyak 3.252 ton dengan nilai menjadi sebesar US\$.918.084,-. Pada tahun 1986 volume ekspor mengalami penurunan menjadi sebanyak 2.685,5 ton tetapi nilai eksportnya tetap mengalami kenaikan menjadi sebesar US\$.928.422,-. Dan pada tahun 1987 volume produksi kembali mengalami kenaikan menjadi sebanyak 2.837,5 ton tetapi nilai produksinya mengalami penurunan menjadi sebesar US\$.875.452.

Dan untuk jenis komoditi telur ikan terbang, volume eksportnya menjadi sebanyak 219 ton dengan nilai ekspor sebesar US\$.3.796.279,- Selanjutnya jenis komoditi ini pada tahun 1985 mengalami penurunan volume

menjadi sebanyak 185 ton yang diikuti oleh penurunan nilai menjadi sebesar US.\$2.552.121,- pada tahun 1986 volume ekspor tetap mengalami penurunan menjadi sebanyak 175,2 ton yang diikuti oleh penurunan nilai ekspor menjadi sebesar US.\$2.375.298,-. Dan pada tahun 1987 volume produksi berlanjut mengalami penurunan menjadi sebanyak 118,5 ton tetapi nilai ekspornya mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 1986 menjadi sebesar US.\$2.724.481,-.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapatlah dijelaskan secara umum dari perkembangan ketujuh jenis komoditi ekspor non-migas Sulawesi Selatan sebelum adanya kebijaksanaan/Paket 27 Oktober 1983 tersebut. Pada tahun 1984 jumlah volume ketujuh jenis komoditi ekspor non-migas tersebut mencapai 26.353 ton dengan total nilai ekspor sebesar US.\$50.086.952,- pada tahun 1985 baik volume maupun nilainya mengalami peningkatan, terlihat volume ekspornya sebanyak 39.119 ton dan nilainya sebesar US.\$53.042.124,- selanjutnya pada tahun 1986 volume ekspornya mencapai 35.456,4 ton atau terjadi penurunan volume dan sebaliknya terjadi kenaikan nilai ekspor menjadi sebesar US.\$72.282.296,- serta pada tahun 1987 jumlah volume ekspor mengalami kenaikan menjadi sebanyak 52.446,8 ton dengan nilai menjadi sebesar US.\$78.445.289,-.

5.2. Perkembangan Ketujuh Jenis Komoditi Ekspor Non Migas Sesudah Pakto 27.

Seperti diketahui bahwa Pakto 27 tersebut merupakan kebijaksanaan deregulasi yang sifatnya mengurangi aturan maupun kendala yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan dunia usaha, khususnya di bidang perdagangan ekspor non-migas.

Perlu pula diketahui bahwa untuk mengetahui kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988 yang biasa disebut Pakto 27, penulis belum dapat memberikan suatu kepastian tentang keberhasilan dari kebijaksanaan tersebut dalam hubungannya dengan perkembangan beberapa jenis komoditi ekspor non-migas, khususnya ketujuh jenis komoditi tersebut, karena kebijaksanaan pemerintah dapat diketahui berhasil atau tidak, jika berjalan beberapa tahun lamanya. Tetapi secara umum dapatlah diketahui dengan membandingkan tabel 5.2. berikut ini dengan tabel 5.1. sebelumnya.

TABEL 5.2.

VOLUME DAN NILAI KETUJUH JENIS KOMODITI EKSPOR
NON MIGAS SULAWESI SELATAN SESUDAH PAKTO 27

No.	Jenis Komoditi	Tahun 1989	
		Nilai (US\$)	Volume (ton)
1.	K o p i	7.536.056	3.206,8
2.	U d a n g	45.121.768	4.672,1
3.	G a p l e k	2.716.064	41.385,3
4.	Teripang	4.665.101	1.423,2
5.	Rumput Laut	2.178.254	4.262,9
6.	Biji Coklat	38.077.784	38.796,3
7.	T.Ikan Terbang	5.637.190	203,0
J u m l a h		105.932.217	93.949,6

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propensi
Sulawesi Selatan.

- Data diolah kembali.

Dari tabel 5.1. yang lalu memperlihatkan bahwa pada tahun 1987 atau sebelum kebijaksanaan Pakto 27 dilaksanakan volume ekspor kopi mencapai 2.432,0 ton dengan nilai sebesar US.\$9.981.331 dan pada tahun 1989 atau sesudah Pakto 27 volume ekspor kopi mengalami peningkatan menjadi sebanyak 3.206,8 ton dengan nilai sebesar US.\$7.536.056,-. Selanjutnya untuk jenis komoditi Udang, volume ekspornya mengalami setelah adanya Pakto 27 yaitu menjadi sebanyak 4.672,1 ton dengan nilai sebesar US.\$45.121.768,-.

Kemudian untuk jenis komoditi gaplek pada tahun 1987 atau sebelum Pakto 27, volume ekspornya mencapai 29.200,8 ton dengan nilai sebesar US.\$2.714.557,- dan jika dibandingkan dengan tahun 1989 atau sesudah Pakto 27, maka volume ekspornya mengalami kenaikan menjadi sebanyak 41.385,3 ton dengan nilai US.\$2.716.064,-.

Untuk komoditi teripang pada tahun 1987 atau sebelum Pakto 27, volume ekspornya mencapai 1.735,9 ton dengan nilai sebesar US.\$2.581.960,- dan jika dibandingkan dengan tahun 1989 atau sesudah Pakto 27, maka volume ekspornya mengalami penurunan menjadi sebanyak 1.423,2 ton tetapi nilai ekspornya mengalami kenaikan menjadi sebesar US.\$4.665.101,-.

Selanjutnya untuk jenis komoditi rumput laut, volume ekspornya sebanyak 2.837,5 ton dengan nilai sebesar US.\$875.452,- selama tahun 1987 atau sebelum ada-

nya kebijaksanaan Pakto 27 dan setelah berlakunya kebijaksanaan tersebut, maka volume ekspor komoditi rumput laut tersebut mengalami peningkatan menjadi sebanyak 4.262,9 ton dengan nilai ekspor sebesar US\$.2.178.254.

Dan untuk komoditi telur ikan terbang pada tahun 1987 volume ekspornya mencapai sebanyak 118,5 ton dengan nilai sebesar US\$.2.724.481,- dan pada tahun 1989 atau setelah berlakunya kebijaksanaan Pakto 27, maka baik volume maupun nilai ekspornya mengalami peningkatan yaitu masing-masing menjadi 203,0 ton dan nilai sebesar US\$.5.637.190,-.

Atau secara keseluruhan dapat pula dijelaskan bahwa pada tahun 1987 atau sebelum berlakunya Pakto 27 volume ekspornya mencapai 52.446,8 ton dengan nilai ekspor sebesar US\$.78.445.289,- dan setelah Pakto 27 volume dan nilai ekspor tersebut mengalami kenaikan yaitu menjadi sebanyak 93,949,6 ton dengan nilai sebesar US\$.105.932.217,-.

Dari uraian tersebut di atas, maka secara umum dapat kita memberikan gambaran bahwa dengan adanya kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988, maka dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan ekspor non-migas khususnya ketujuh jenis komoditi yang diambil sebagai sampel. Dan dapat memberikan pengaruh pula terhadap setiap jenis komoditi dari ketujuh jenis komoditi yang diteliti, walaupun jenis komoditi teripang tidak membe-

rikan peningkatan volume tetapi memberikan peningkatan terhadap nilai eksponya yang cukup menggembirakan.

Selanjutnya dapat pula dijelaskan bahwa, setelah diberlakukannya kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988, maka pada tahun 1989 volume ekspor secara keseluruhan (ketujuh komoditi utama) mengalami peningkatan yang diikuti oleh peningkatan nilai ekspor (terlihat pada tabel 5.1. dan 5.2).

4. Selanjutnya dari setiap jenis komoditi yang diteliti menunjukkan peningkatan setelah adanya kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988. Terbukti dari ketujuh jenis komoditi yang diteliti, hanya ada satu komoditi yang mengalami penurunan jumlah volume ekspornya tetapi nilai ekspornya mengalami kenaikan, yaitu jenis komoditi teripang, dimana volumenya menjadi 1.423,2 ton dengan nilai sebesar US\$. 4.665.101,-.
5. Dengan adanya kebijaksanaan deregulasi 27 Oktober 1988, maka volume dan nilai ekspor komoditi utama Sulawesi Selatan (jenis komoditi yang diteliti) mengalami peningkatan menjadi sebanyak 93.949,6 ton atau sebesar US\$. 105.932.217,-.

6.2. Saran - Saran

1. Disarankan kepada pemerintah daerah Sulawesi Selatan agar pelaksanaan kebijaksanaan Pakto 27 dapat dijalankan sebagaimana mestinya, agar supaya memberikan kemudahan kepada para eksportir untuk mendapatkan kredit.
2. Dan kepada para eksportir disarankan agar menggunakan kebijaksanaan tersebut dengan sebaik-baiknya.